

**DETERMINAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN**

**(SEBUAH STUDI KASUS PELAKSANAAN PDM-DKE
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

KUNCORO HIMAWAN

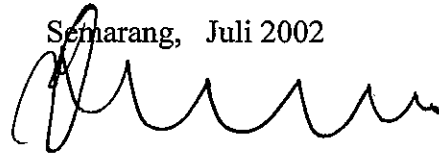
D4E000101

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juli 2002



KUNCORO HIMAWAN

LEMBAR PENGESAHAN

**DETERMINAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Sebuah Studi Kasus Pelaksanaan PDM-DKE
Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :
KUNCORO HIMAWAN
NIM : D4E000101

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Juni 2002

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



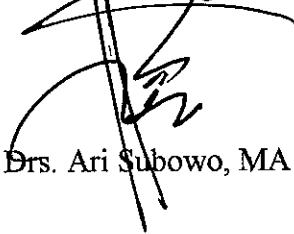
Dr. Ari Pradanawati, MS

Penguji I



Drs. Edi Santosa, SU

Pembimbing II



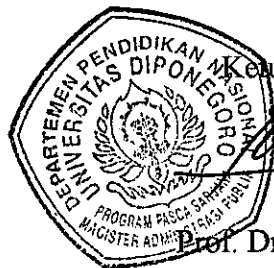
Drs. Ari Subowo, MA

Penguji II




Dra. M. Suryaningsih, MS

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Magister Sains
Tanggal 25 Juni 2002



Ketua Program Studi MAP


Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD.

ABSTRAKSI

Dari penelitian akan dapat memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hubungan antara faktor kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE. Bagi pemerintah Kota Semarang penelitian ini akan dapat memberikan masukan untuk dijadikan sebagai bahan dalam menyusun penyempurnaan program-program pengentasan kemiskinan secara umum. Sedangkan bagi masyarakat akan ada peningkatan kualitas dalam pengelolaan PDMDKE. Hasil penelitian yang kami dapat menunjukkan bahwa hubungan antar variabel kemampuan dengan pelaksanaan program ada sebesar 36,4% tingkat kemampuan yang sangat baik dan yang mempunyai pelaksana program pada kategori baik, serta ada 18,2% yang masuk kategori sangat baik.

Bagi mereka yang menilai koordinasi dianggap sangat baik maka menyatakan bahwa pelaksana program dianggap baik. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa tingkat koordinasi berhubungan secara langsung terhadap tingkat pelaksanaan program. Sedangkan hubungan antara variabel pengawasan dengan pelaksanaan program menunjukkan bahwa sebagian besar atau 45,9% mempunyai tingkat pengawasan yang kurang baik. Dan bagi mereka yang mempunyai tingkat pelaksanaan yang sangat baik maka sebagian besar atau 100% juga mempunyai tingkat pengawasan yang sangat baik.

Dari uraian tersebut diatas penulis memandang perlu tentang keberhasilan program PDMDKE ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel di atas, tetapi ada faktor lain yang harus diperhatikan seperti kepemimpinan, sosial budaya, ekonomi, politik dan teknologi atau dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel independen ini mempunyai sumbangan sebesar 21%, sedangkan sisanya sebesar 79,9% adalah faktor keberhasilan pelaksanaan program yang disebabkan oleh variabel lainnya.

ABSTRACT

This research was aimed at analyzing the relations between three variables namely Capability of PDMDKE program executors, Coordination among these executors, as well as Control over PDMDKE, and the success of PDMDKE Program implementation in Banyumanik Sub-district, Semarang. Each of the three independent variables were tested in terms of its relation to the dependent variable. Besides the three of them were also tested altogether with Success of the program implementation as the dependent variable.

Research on the factors influencing the success of PDMDKE (The Overcoming of Economic Crisis Impact in Urban Areas) Program implementation shows that: (1) Capability of government apparatuses in charge of PDMDKE program is still very low, reflected by several indicators such as low formal education, lack of experience, low personnel maturity, and low ability in administrative affairs. (2) Unclear coordination results in disturbance in program communication. (3) Although Control process runs well, its effectivity is still very weak. (4) The success of program implementation is valued differently by the society. Most of them think that this program is able to enhance the society's economic condition. However, some of them think that the program beneficiaries were not well chosen, while rules of the program implementation are weak.

Based on this result the researcher is of the opinion that the success of PDMDKE Program implementation is not only influenced by capability of program executors, coordination and control but may also be influenced by other factors such as leadership, socio culture condition, economic, politics, technology, and others.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Determinan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan (Sebuah Studi Kasus Pelaksanaan PDMDKE Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S2 Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharap saran-saran yang bermanfaat bagi kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Ari Pradhanawati, MS, Pembimbing I yang telah memberi bimbingan hingga selesainya tesis ini.
2. Bapak Drs. Ari Subowo, MA, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ayahanda dan ibunda tercinta yang memberikan dorongan material dan spiritual kepada penulis.
5. Istri tercinta Ir. Kartiningrum Sari dan Ananda tersayang Ayu Septiana, Fitri Permatasari, Wira Satriyo Utomo yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Juli 2002

Penulis,



Kuncoro Himawan

MOTTO

**ING NGARSO SUNG TULADA, ING MADYO MANGUN KARSA,
TUT WURI HANDAYANI**

(KI HADJAR DEWANTORO)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
B. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Rancangan Penelitian	34
B. Ruang Lingkup	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Variabel Penelitian	35
E. Jenis dan Sumber Data	37

F. Instrumen Penelitian	38
G. Populasi dan Teknik Pengambilan sampel	40
H. Teknik Pengumpulan Data	41
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV DETERMINAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN	
KEMISKINAN	47
A. Karakteristik Wilayah Kecamatan Banyumanik.....	47
B. Pelaksanaan Keberhasilan Program PDMDKE	50
C. Kemampuan Pelaksana Program	64
D. Koordinasi	69
E. Pengawasan.....	73
F. Kategori Variabel Penelitian.....	78
G. Uji Hipotesis.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	43
1. Lampiran 1 : Distribusi Frekuensi	
2. Lampiran 2 : Kategorisasi Variabel	
3. Lampiran 3 : Distribusi Skor Responden	
4. Lampiran 4 : Uji Validitas dan Reliabilitas	
5. Lampiran 5 : Tabel Silang / Uji Rank Kendall	
6. Lampiran 6 : Uji Konkordasi Kendall	

7. Lampiran 7 : Data Nama Pengurus Pokmas Program PDMDKE Kecamatan
Banyumanik Tahun 2002
8. Lampiran 8 : Data Induk
9. Lampiran 9 : Kuesioner

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian	48
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	49
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Umur.....	50
Tabel 4.4. PDMDKE Dapat Membantu Ekonomi Masyarakat	50
Tabel 4.5. Ketepatan Sasaran PDMDKE	52
Tabel 4.6. Manfaat PDMDKE Bagi Pengembangan Ekonomi	53
Tabel 4.7. Kemudahan Memahami Pedoman Pelaksanaan	54
Tabel 4.8. Tingkat Penyimpangan Program.....	55
Tabel 4.9. Kemampuan PDMDKE Untuk Kreativitas Program.....	56
Tabel 4.10. Tingkat Kesulitan Penentuan Sasaran	57
Tabel 4.11. Kejelasan PDMDKE Dalam Prosedur	58
Tabel 4.12. Dukungan Masyarakat Terhadap PDMDKE.....	58
Tabel 4.13. Pemahaman Masyarakat Pada PDMDKE	59
Tabel 4.14. Keseringan Beda Persepsi Antar Instansi	60
Tabel 4.15. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pada Pelaksanaan	61
Tabel 4.16. Kejelasan PDMDKE Dalam Aturan Pelaksanaan	62
Tabel 4.17. Kejelasan Wewenang Bagi Lembaga Pelaksana	63
Tabel 4.18. Intensitas Promosi Program PDMDKE	63
Tabel 4.19. Tingkat Pendidikan Pelaksana Program.....	64
Tabel 4.20. Tingkat Pengetahuan Pelaksana Program	65
Tabel 4.21. Tingkat Pengalaman Kerja Yang Dimiliki Pelaksana	66
Tabel 4.22. Kemampuan Interaksi Pelaksana Program	66

Tabel 4.23. Persetujuan Tentang Kematangan Pikiran Pelaksana.....	67
Tabel 4.24. Kemampuan Administrasi Pelaksana Program	68
Tabel 4.25. Kejelasan Dalam Kesatuan Gerak Organisasi.....	69
Tabel 4.26. Kelancaran Pelaksana Komunikasi Program	70
Tabel 4.27. Persetujuan Adanya Kesatuan Dalam Kebijakan	71
Tabel 4.28. Persetujuan Adanya Kesamaan Tindakan Program	71
Tabel 4.29. Kelanjutan Penyebaran Informasi Kebijakan Program	72
Tabel 4.30. Tingkat Pengawasan Sesuai Peraturan.....	73
Tabel 4.31. Peran Pengawasan Dalam Norma Pengawasan	74
Tabel 4.32. Pemahaman Prosedur Kerja Oleh Masyarakat.....	75
Tabel 4.33. Pengetahuan Pelaksana Terhadap Evaluasi Kegiatan	75
Tabel 4.34. Pemahaman Pelaksana Terhadap Kesalahan Program	76
Tabel 4.35. Penyimpangan Program Dalam Pemilihan Sasaran	77
Tabel 4.36. Kategorisasi Variabel Pelaksana Program.....	79
Tabel 4.37. Kategorisasi Variabel Kepemimpinan	80
Tabel 4.38. Kategorisasi Variabel Koordinasi	81
Tabel 4.39. Kategorisasi Variabel Kemampuan.....	81
Tabel 4.40. Hubungan Antara Kemampuan Dengan Pelaksana Program	
PDMDKE.....	83
Tabel 4.41. Uji Kendall Antara Kemampuan Dengan Pelaksana Program	
PDMDKE.....	83
Tabel 4.42. Hubungan Antara Koordinasi Dengan Pelaksana Program.....	85
Tabel 4.43. Uji Kendall Antara Koordinasi Dengan Pelaksana Program	86
Tabel 4.44. Hubungan Antara Pengawasan Dengan Pelaksana Program.....	87

Tabel 4.45. Uji Kendall Antara Kemampuan Dengan Efektifitas	88
Tabel 4.46. Uji Konkordasi.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dewasa ini telah menggoncang sendi-sendi dasar pembangunan nasional yang telah dirintis dengan susah payah selama 32 tahun, Indonesia terperosok masuk ke krisis yang dalam. Pada waktu itu rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen (sejak diambangkan pada 14 Agustus 1997), dan inflasi melonjak mencapai lebih dari 50 persen. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pula pasar uang dan modal rontok, puluhan bahkan ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan, serta pengangguran dan jumlah rakyat miskin bertambah (The World Bank, 1998)

Kemiskinan saat ini masih merupakan masalah nasional yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan yang menonjol adalah adanya kecenderungan kenaikan jumlah keluarga miskin sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dilihat dari dimensinya maka masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek antara lain ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan

kemiskinan melibatkan penduduk miskin dengan karakteristik yang sangat kompleks (Djayanegara dan Arifin, 2000:72-74).

Demikian pula dari perspektif perkembangan teori pembangunan terdapat dua arus pemikiran utama yang berpengaruh dalam merumuskan strategi memerangi problem kemiskinan yaitu paradigma pertumbuhan dan paradigma kesejahteraan. Paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) bertolak lagi asumsi bahwa kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan masalah itu akan teratasi melalui proses yang disebut *Trickle Down Effect*. Proses yang dimaksud adalah bahwa kemiskinan akan dapat teratasi melalui keberhasilan yang ada di tingkat atas dan dengan sendirinya akan berdampak kepada peningkatan dan kemakmuran di level bawah. Sehingga derajat kemiskinan bisa dikurangi secara bertahap. Paradigma pertumbuhan ternyata kurang ampuh dalam mengatasi kemiskinan, sehingga lahirah paradigma kesejahteraan. Menurut Sugito Suwito dalam Harian Suara Pembaharuan Selasa 23 Mei 2000 mengatakan bahwa angka pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia akan cenderung meningkat seiring dengan gerak kenaikan angka inflasi. Sampai saat ini dari data terakhir Agustus 1999 angka jumlah penduduk miskin sebesar 37,5 juta atau 18,17%. Sedangkan sampai saat ini angka inflasi pada tahun 2001 mengalami kenaikan, sehingga jumlah penduduk miskin juga akan bertambah.

Berkaitan dengan pengukuran kemiskinan, angka jumlah kemiskinan yang dihitung BPS sebetulnya hanya didasarkan pada '*basic needs*' (kebutuhan dasar) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Modul yang dihitung setiap tiga tahun sekali dan disajikan pada level nasional dan propinsi. Angka tersebut hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk miskin secara makro, sehingga tidak bisa diketahui siapa dan dimana penduduk miskin tersebut berada. Untuk mendapatkan rumahtangga miskin secara lengkap dengan pendekatan modul konsumsi, akan memakan waktu, tenaga serta biaya yang sangat besar sehingga kurang efektif dan efisien..

Guna mengatasi kemiskinan, Pemerintah telah melakukan upaya dalam bentuk program pembangunan seperti pemberian bantuan modal usaha, bantuan teknologi atau pendampingan yang dimaksudkan untuk merangsang perkembangan kegiatan produktif keluarga miskin, tidak mustahil akan bersifat *meritocratic* karena tidak didukung oleh kesiapan basis sosial masa secara merata. Bisa dibayangkan, betapa sulitnya seorang pengusaha kecil industri konveksi misalnya, untuk bersaing dengan perusahaan garmen, baik dari segi modal, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa strategi memerangi kemiskinan terutama bertumpu pada implementasi kebijaksanaan yang bersifat diskriptif. Selama ini melalui instrumen kebijakan moneter perkreditan dan instrumen kebijaksanaan anggaran telah dialokasikan dana untuk membiayai berbagai program yang dirancang untuk membantu rakyat kecil.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang ditempuh melalui kebijaksanaan moneter perkreditan itu meliputi Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Di samping itu dikenal berbagai program Inpres yang telah ditempuh melalui instrumen kebijaksanaan anggaran yaitu meliputi Program Inpres Desa, Kabupaten, SD, Kesehatan Masyarakat, Penghijauan, Pasar, IDT (94/95).

Kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi yang secara konsepsional berlawanan dengan pendekatan pembangunan yang berdimensi kerakyatan semakin kehilangan daya tariknya karena telah banyak terkumpul bukti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kebijakan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat meritocratic (Kartasasmita, 1996:23-30). Penekanan yang lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing dari pada persamaan dalam hasil yang dicapai adalah turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara lain *laissez-faire* dan persamaan.

Selama ini, kebiasaan yang sudah-sudah adalah masing-masing dinas atau instansi biasanya menentukan sendiri-sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas. BKKBN, misalnya, memakai hasil pendapatan tahapan keluarga sejahtera sebagai dasar penentuan kelompok sasaran. Sementara itu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan biasanya tidak memakai

mentah-mentah hasil pendataan BKKBN itu, tetapi juga berusaha melakukan pendataan sendiri dengan pertimbangan fokus sasaran agak berbeda. Selain pemborosan dengan anggaran karena tiap-tiap instansi harus menyediakan tenaga, waktu dan dana sendiri-sendiri untuk keperluan pendataan awal kelompok sasaran, kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri ini acap kali menyebabkan dampak program menjadi parsial karena sifatnya tidak terpadu.

Usaha-usaha pendataan perlu dikembangkan guna menghindari inefisiensi dan duplikasi kelompok sasaran. Dari segi sosial kita dapat kita dapat memakai hasil pendapatan keluarga sejahtera dari BKKBN, namun instrumen pendataan perlu ditambah dengan indikator lain dari segi pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau dirumuskan, Keluarga miskin yang seharusnya diprioritaskan sebagai kelompok sasaran seyogyanya adalah keluarga pra-sejahtera karena alasan ekonomi, terutama mereka yang saat ini ter-PHK, atau tidak bekerja, mempunyai anak yang putus sekolah atau anak yang bekerja, dan termasuk kategori kurang gizi atau sering sakit atau mempunyai masalah sosial lainnya.

Fenomena “lingkaran kemiskinan” bukanlah satu kawasan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan fenomena “golongan berlebih”. Banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan dan proses pemiskinan pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak milik atau hak orang-orang miskin secara kurang adil. Posisi tawar-menawar yang lemah, ketidak berdayaan dan kurang dimilikinya akses pada hukum dan perlindungan sosial yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan

penduduk miskin seringkali mudah diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran perlakuan-perlakuan yang merugikan mereka.

Program pembangunan seyogyanya tidak terjebak dalam program-program yang bersifat sumbangan, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered, empowering, participatory*, dan *sustainable* (Korten, 1995:15-17). Asumsi dasar pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada potensi manusia. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni :

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong pemberdayaan dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah lokal dan
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi dan konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah dan kemampuan pemilikan dan pengendalian lokal. (Tamagola, 1998:27)

Upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara (Renduk Taskin Naional, BKKBN, 1999: 38) yaitu *Pertama*, menciptakan komitmen, suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, karena diasumsikan bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakekat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa rakyat mempunyai potensi untuk

mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke kemandirian keluarga, atau sebaliknya, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, memperkuat potensi akses atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan, baik fisik maupun sosial, yang dapat diakses oleh atau yang sangat akrab dengan masyarakat lapisan bawah.

Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti membangun sikap dan semangat positif, mendidik, mendampingi dan melindungi yang lemah serta membela kepentingan masyarakat lemah.

Beberapa program dalam pengentasan kemiskinan ini antara lain KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), serta IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program PDMDKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi) sendiri sebetulnya merupakan bagian integral dari program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Program PDMDKE mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengerakkan kembali ekonomi rakyat di daerah perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan melalui pemberian modal usaha, mendukung sarana dan prasarana bagi pengembangan produksi, distribusi barang dan jasa serta meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat.

Pelaksanaan program PDMDKE pada hakekatnya mencoba menurunkan jumlah keluarga miskin yang mempunyai keterbatasan dalam kehidupan sosial

ekonomi. Data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh BKKBN menunjukkan bahwa di Kecamatan Banyumanik sejak tahun 1998 yang masuk Pra-KS adalah 1925 keluarga dan pada tahun 2001 telah turun menjadi 1594 keluarga . Sedangkan jumlah keluarga Sejahtera I karena alasan ekonomi pada tahun 1998 adalah 2929 sedangkan pada tahun 2000 justru meningkat menjadi 3588. Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya program PDMDKE telah meningkatkan jumlah keluarga yang masuk kategori Pra-KS menjadi KS-I melihat dengan adanya kenaikan antara tahun 1998 hingga 2000. Data ini telah memberikan bukti bahwa program PDMDKE belum sepenuhnya meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Kompas (Jum'at 4 Juli 1997) melaporkan bahwa pelaksanaan program JPS belum mencapai sasaran karena proses pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara semestinya. Beberapa kelemahan lain yang muncul selama pelaksanaan program PDMDKE antara lain :

1. Rendahnya kemampuan pelaksana program terutama dalam menterjemahkan isi kebijakan sehingga muncul berbagai penyimpangan baik dari sisi prosedural maupun teknis pelaksanaan.
2. Lemahnya koordinasi antar lembaga sehingga penentuan kelompok keluarga miskin masih tumpang tindih.
3. Lemahnya mekanisme pengawasan program karena tidak adanya kejelasan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tentang kebijakan pengentasan kemiskinan secara umum serta pembahasan terhadap program PDMDKE diatas, maka penelitian ini akan menfokuskan pada studi **“DETERMINAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (SEBUAH STUDI KASUS PELAKSANAAN PDMDKE DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam konsep administrasi negara untuk pendekatan pemecahan program pengentasan kemiskinan maka variabel kemampuan aparat, koordinasi dan pengawasan sangatlah menentukan. Penelitian ini direncanakan meneliti pelaksanaan program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Keberhasilan program tersebut menurut penulis dipengaruhi oleh kemampuan aparat dan koordinasi. Untuk mencapai keberhasilan program (efektifitas organisasi) penelitian ini akan melihat pada faktor manusianya. Karena seperti dikatakan oleh Richard M. Steers, bahwa dalam penelitian mengenai efektifitas organisasi, sumber daya manusia muncul sebagai fokus primer (utama) dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku ini di tempat kerja. (Steers, 1980 : 20)

Selain hal tersebut diatas, Kast Rosenzweig dan Rosenzweig (dalam Diana Conyers, 1970 : 222). mengatakan bahwa kemampuan tergantung atas

dua hal yakni ketrampilan dan pengetahuan Berdasarkan hal tersebut di atas obyek dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan program PDM-DKE di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Banyumanik, dalam hal ini penulis mengasumsikan variabel kemampuan aparat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan program tersebut.

Dalam proses pencapaian keberhasilan / efektifitas organisasi / instansi, suatu organisasi sering tidak bisa sendiri, sehingga mau tidak mau harus berhubungan dengan organisasi (instansi lain). Demikian pula halnya di dalam proses keberhasilan / efektifitas program PDM-DKE yang melibatkan beberapa instansi / organisasi, oleh karena itu efektifitas organisasi bisa dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, selain ditentukan oleh faktor internal juga ditentukan oleh faktor eksternal.

Faktor-faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, hal ini bisa berupa kepemimpinan, kemampuan aparat, ukuran organisasi, koordinasi yang dilaksanakan, iklim organisasi dan lain sebagainya, sedangkan faktor – faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari dari luar organisasi, hal ini bisa berupa pengaruh lingkungan sosial, budaya ekonomi, teknologi dan lain sebagainya.

Karena begitu banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi, maka penulis dalam penelitian ini hanya membatasi pada variabel pengaruh yang berasal dari dalam (internal organisasi), yang diduga berpengaruh terhadap efektifitas program PDM-DKE yaitu kemampuan aparat

dan koordinasi. Selain faktor kemampuan aparat dan koordinasi penulis juga ingin meneliti faktor pengawasan agar pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dari Marius Widjajarto dalam Kompas, Jum'at / 19 Mei 2001 bahwa Program Jaring Pengaman Sosial yang dananya 200 juta dolar AS telah dilaksanakan oleh pemerintah tanpa pengawasan. Jika tanpa pengawasan maka program pengentasan kemiskinan akan berjalan pincang, alokasi dana ke masyarakat tidak jelas dan masyarakat tidak mengetahui hak-haknya untuk menerima bantuan. Dalam sebuah sumber di Kompas pada hari Jum'at 4 Juli 1997 dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus ada secara terus menerus mengikuti, memantau dan menilai, seberapa jauh segala sesuatu yang menyangkut kegiatan berjalan dan dijalankan. Oleh karena itu faktor pengawasan layak untuk dikaji, karena kesalahan program dapat sedini mungkin untuk dilakukan perbaikan.

Evaluasi program merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian administrasi negara. Steers (1980:20) memandang bahwa penelitian terhadap efektivitas organisasi yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan maka faktor kualitas sumberdaya merupakan faktor yang dominan. Rosenweig (dalam Diana Conyers,1970:222) telah menentukan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi pelaksana. Faktor internal sendiri adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi antara lain kepemimpinan, kemampuan

aparatur, koordinasi, iklim organisasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi antara lain kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan teknologi.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemampuan pelaksana program mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE ?
2. Apakah koordinasi mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE ?
3. Apakah pengawasan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE ?
4. Apakah kemampuan aparatur, koordinasi dan pengawasan mempunyai hubungan positif dan signifikan secara bersama-sama dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis hubungan antara kemampuan pelaksana program dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.
2. Menganalisis hubungan antara koordinasi dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.
3. Menganalisis hubungan antara pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

4. Menganalisis hubungan bersama-sama antara kemampuan aparatur, koordinasi dan pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah :

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hubungan antara faktor kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE ?
- 2 Bagi Pemerintah Kota Semarang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dijadikan sebagai bahan dalam menyusun penyempurnaan program-program pengentasan kemiskinan secara umum.
- 3 Sedangkan bagi masyarakat akan ada peningkatan kualitas dalam pengelolaan PDMDKE.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Landasan teori dapat disebut juga sebagai tinjauan kepustakaan atau dapat disebut juga sebagai telaah teoritis. Hal ini di peroleh dari literatur-literatur yang ada hubunganya dengan masalah penelitian yang bersangkutan. Oleh karena itu landasan teori merupakan landasan atau dasar pemikiran lebih lanjut terhadap masalah yang akan di teliti. Untuk memudahkan pemahaman kerangka teori ini akan diberikan batasan-batasan pembahasan. Variabel bebas yang akan dikaji adalah variabel kemampuan aparatur, koordinasi dan pengawasan. sedangkan variabel terikatnya pelaksanaan program PDMDKE.

Pembahasan tentang kemampuan aparat, koordinasi dan pengawasan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program PDMDKE. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PDMDKE dimana faktor-faktor organisasi tampaknya merupakan permasalahan utama seperti rendahnya kualitas kemampuan pelaksana program, lemahnya mekanisme koordinasi kerja serta lemahnya sistem pengawasan program.

a. Keberhasilan Program

Membicarakan masalah kemiskinan di Indonesia akan berhadapan dengan berbagai pertanyaan rumit untuk dijawab.

Faturachman dan Molo (1995: 4) : menyatakan berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia? Bagaimana mengukurnya? Apa saja gatra dan sifat - sifatnya? Dari mana dan apa yang menjadi sumbernya? Dan bagaimana menanggulangnya? Itulah pertanyaan - pertanyaan pelik yang akan semakin sering kita dengar pada masa mendatang. Memahami adanya kerumitan tersebut, maka setiap definisi kemiskinan mengandung banyak kelemahan.

Chambers (1984 : 111 - 113) : menyatakan bahwa inti kemiskinan adalah deprivation trap yang terdapat 5 unsur ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu :

- (1) Kemiskinan itu sendiri
- (2) Kelemahan fisik
- (3) Keterasingan
- (4) Kerentanan
- (5) Ketidakberdayaan..

Tjokrowinoto (1973 : 112) : menyatakan kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah powerlessness, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran. Kemiskinan juga berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi atau mereka terperangkap dalam hubungan industri yang eksploitatif, yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang, dengan imbalan rendah. Ini

disebabkan karena bargaining position mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah. Kemiskinan dengan demikian, juga berarti hubungan dependensi kepada pemilik tanah, kepada money lenders, kepada pimpinan proyek, kepada elit desa dan sebagainya.

Jazairy (1994 : 142 - 144) : menyatakan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari berbagai indikator

1. Deprivasi materiil yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, papan dan kabutuhan konsumsi dasar lainnya.
2. Isolasi seperti dicerminkan geografiknya maupun oleh marginalisasi rumah tangga miskin secara sosial dan politik. Mereka sering tinggal di daerah terpencil hampir tanpa sarana transportasi dan komunikasi.
3. Alienasi, yaitu perasaan tidak punya identitas dan tidak punya kontrol atas diri sendiri. Ini timbul akibat isolasi dan hubungan sosial yang eksploratif. Walaupun proses pembangunan berjalan seru dan menghasilkan teknologi baru, mereka tidak bisa ikut mememanfaatkannya. Mereka kekurangan kecakapan yang bisa dijual.
4. Ketergatangan inilah yang selama ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk bergaining dalam hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara lain majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, petani tidak bisa menetapkan harga hasil taninya.

5. Ketidak mampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih Produksi konsumen dan kesempatan kerja, serta kurangnya perwakilan sosial - politik mereka, tercermin dalam tidak adanya fleksibilitas dan kurangnya kesempatan si miskin di desa.
6. Kelangkaan aset membuat penduduk miskin di desa bekerja dengan tingkat produktifitas yang sangat rendah.
7. Kerentanan terhadap guncangan eksternal dan terhadap konflik - konflik sosial internal juga sangat berpengaruh terhadap status kemiskinan penduduk pedesaan. Kerentanan ini bisa timbul karena faktor alamiah (Kemarau panjang, banjir, hama), karena perubahan pasar (merosotnya harga komoditi), kondisi kesehatan (penyakit) dsb.
8. Tidak adanya jaminan, keamanan dari tindak kekerasan akibat status sosial rendah, karena lemah, karena faktor - faktor agama, ras, etnik dsb.

Berdasarkan pendapat - pendapat tersebut dapat ditemukan sekurang - kurangnya 4 penyebab kemiskinan :

Pertama ; rendahnya tingkat pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, juga mengakibatkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada taraf, penduduk menentukan. Taraf penduduk yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Kedua ; rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

Ketiga ; adalah terbatasnya lapangan kerja. Selama ada penduduk dan lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutus lingkaran kemiskinan.

Keempat ; Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena keterpencilan dan keterisolasian.

Dapat dijelaskan bahwa kondisi rendahnya kesehatan, menyebabkan rendahnya produktifitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan pada gilirannya akan menuju generasi kemiskinan berikutnya yang ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Demikian dan seterusnya lingkungan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Keadaan kemiskinan karena kondisi penduduk diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian. Penduduk miskin hidup terpencil, sehingga sulit atau tidak terjangkau oleh pelayanan penduduk, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Masyarakat miskin tidak dapat turut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Penduduk miskin yang dalam keadaan demikian, tidak dapat memanfaatkan prasarana yang telah dibangun, memanfaatkan teknologi yang telah dibangun dari berbagai kegiatan lainya yang menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan kesempatan yang berkembang .

Adanya kondisi tersebut tentu akan sangat menyulitkan penduduk miskin dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan taraf hidupnya. Karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin atau menanggulangi kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah terhadap kondisi - kondisi tersebut. Komponen utama dalam setiap kebijakan publik akan menyangkut tiga aspek yaitu adanya tujuan yang spesifik, kejelasan sasaran serta cara guna mencapai tujuan. Dunn (1994:40) menyebut bahwa proses ini merupakan bagian penting dalam setiap implementasi kebijakan dan merupakan suatu proses dinamis untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan dan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang selalu berubah dan harus berubah guna mencapai efektivitas dan efisiensi.

Presman dan Wildavsky (dalam Wahab, 1991:149) nampaknya mempunyai pandangan cukup berbeda karena implementasi harus juga memperhatikan faktor-faktor eksternal. Secara rinci implementasi didefinisikan sebagai sebuah interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mengatasinya.

Hal tersebut senada dengan pendapat Jones (dalam Wahab,1991:50) yang mendefinisikan implementasi sebagai konsep

yang dinamis yang melibatkan secara terus- menerus usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan atau mengatur aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam dampak” (dalam Wahab,1991:50)

Pengertian diatas telah memberikan makna bahwa implementasi program harus memahami karakteristik kelompok sasaran. Adanya kejelasan terhadap kelompok sasaran ini akan memudahkan dalam penyusunan langkah-langkah yang konkrit serta penyusunan metode yang tepat dalam pencapaian tujuan.

Pengertian terhadap implementasi kebijakan merupakan salah satu dimensi penting akan tetapi perlu digali pula beberapa faktor penting yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi program. Edward (1984 : 102) dalam teori implementasi menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program akan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi program, faktor sumberdaya pelaksana program, sikap positif kelompok sasaran terhadap program, dan struktur birokrasi yang transparan dan fleksibel. Sedangkan dalam studi implementasi (Ripley dan Randall dalam Samodra Wibawa,1994:138) terdapat dua dimensi pokok yaitu :

1. Implementasi sebagai studi yang memandang bahwa agen-agen dan aparat yang terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Hal ini berarti suatu kebijakan yang dilaksanakan karena adanya keharusan melaksanakannya. Disinilah pentingnya peran birokrasi

yaitu sebagai organisasi yang memastikan perencanaan berjalan dengan baik.

2. Implementasi sebagai suatu studi yang melukiskan apa yang terjadi sebenarnya. Pengertian ini mendasarkan diri pada suatu penelitian dengan menggunakan model linier. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan bagaimana suatu kebijaksanaan itu diopresionalkan menjadi fokus studi ini.

Aspek pertama yang memandang bahwa studi implementasi sangat berkaitan dengan birokrasi pelaksana. Sedangkan dimensi lebih melihat pada aspek dampak yang terjadi karena adanya implemtasi program. Secara detail bahwa implementasi akan sangat berkaitan dengan :

- 1 Menggambarkan kenyataan yang ada dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan.
- 2 Menerangkan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari suatu program dan sebab-sebabnya.
- 3 Mengevaluasi aspek-aspek proses pelaksanaan yang di harapkan serta cara-cara melaksanakan program tersebut.
- 4 Mengidentifikasi dan menerapkn suatu kebijaksanaan dengan jelas.

b. Kemampuan Pelaksana Program

Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam suatu organisasi karena mereka merupakan faktor penggerak roda organisasi. Untuk itu maka diperlukan kemampuan yang memadai

terutama bagi para tenaga pelaksana program. Dalam sebuah organisasi yang modern dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena hal ini akan mendorong tercapainya tujuan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Kemampuan aparatur pemerintah pelaksana yang di hubungkan dengan pekerjaan dapat diartikan sebagai berikut :

“Suatu keadaan pada diri seseorang yang secara penuh bersungguh-sungguh bekerja, berdaya guna untuk melaksanakan pekerjaan sehingga memungkinkan sesuatu tujuan yang akan tercapai”(Steer, 1980:21)

Dari pengertian diatas ada tiga hal yang penting yang berkaitan dengan kemampuan aparatur pelaksana yaitu kecakapan, fisik dan mental, dimana ketiganya harus di perankan secara terpadu. Dalam kerangka susunan organisasi, kemampuan selalu diidentifikasi dengan kedudukan seseorang sehingga dalam proses pengembangan organisasi dan SDM, baik tahap seleksi maupun pembinaan karier, prinsipnya penempatan seseorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing personal.

Kemampuan aparatur pelaksana didefinisikan oleh Miffah Thoha sebagai berikut :

“Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan. (Dalam Samudra Wibawa, 1994:154)

Berdasarkan pengertian di atas maka kemampuan dimaksud adalah tingkat kecakapan atau ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana program.

c. Koordinasi Pelaksanaan Program

Koordinasi menurut Mukiyat (1975:35) adalah sinkronisasi atau penyelarasan dari kegiatan secara teratur, guna memberikan jumlah waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang tepat, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang selaras (harmonis) dan disahkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan Siagian (1967 : 10) berpendapat, “koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama, untuk mencapai kesatuan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan bersama”. Pendapat di atas telah mengarisbawahi bahwa untuk mencapai tujuan organisasi merupakan salah satu unsur penting.

Syafruddin (1976 : 77), juga mengatakan mengenai perlunya koordinasi dalam organisasi. Keharusan utama dalam segala organisasi ialah adanya hubungan-hubungan yang harmonis yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang diintegrasikan, dan untuk tujuan esensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas diintegrasikan itu dan dipertimbangkan satu sama lain. Apabila sikap antar pejabat atau petugas dalam satu organisasi tidak saling mendukung dalam menjalankan tugas organisasi maka akan terjadi kesimpangsiuran pelaksanaan tugas. Ini akan

berakibat pada pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta berakibat kepada timbulnya bentrokan-bentrokan psikologis antar pejabat, sehingga masyarakat menjadi malas berhubungan dengan birokrasi semacam itu.

Lebih lanjut Cokrowinoto (1993 : 64) berpendapat koordinasi merupakan aktiva menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menuju arah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran atau kekosongan kerja”.

Dari berbagai pendapat diatas tentang koordinasi dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Atas dasar itu dapatlah kiranya azas koordinasi diartikan sebagai berikut, yaitu didalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan antar pejabat (aparatus).

Berdasarkan atas definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, berikut ini dapat dijelaskan ciri-ciri koordinasi itu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil baik karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continue process*). Artinya suatu proses yang bersifat keseimbangan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang bekerjasama didalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-usaha daripada setiap kegiatan individu, sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil yang telah ditentukan bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha / tindakan meminta kesadaran / pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja. (Syafrudinn, 1975 : 117)

Dengan melihat ciri-ciri koordinasi tersebut diatas kita dapat mengetahui apakah dalam organisasi ataupun antar organisasi telah melakukan koordinasi secara maksimal. Disamping itu menurut

pendapat Mukiyat (1984 : 25) : untuk berhasil pengkoordinasian hendaknya juga dipenuhi syarat-syarat berikut :

1. Pembagian kerja yang jelas dalam organisasi
2. Semangat kerjasama yang besar diantara para karyawan
3. Fasilitas kontak dan tata hubungan yang cukup bagi semua pihak dalam organisasi yang bersangkutan.
4. Diciptakan pada tahapan-tahapan daripada suatu kegiatan dan dipertahankan sebagai proses yang kontinyu.

d. Pengawasan

Menurut Siagian (1967 : 110), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan selama seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses, yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kenyataan mengenai pelaksanaan tugas apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip yang sudah ada. Suatu proses berarti terkandung suatu rangkaian dan urutan kegiatan yang secara tertentu diarahkan kepada suatu tujuan. Oleh karena pengawasan sebagai suatu proses maka dalam pelaksanaan kegiatannya diperlukan

suatu rangkaian urutan atau tahapan-tahapan pekerjaan untuk mencapai tujuan atau sarannya.

Menurut Koontz (dalam Siagian, 1976 : 641) menyatakan bahwa proses dasar pengawasan dimanapun ditemui dan mengenai apapun, meliputi tiga tahap:

1. Menetapkan alat ukur
2. Mengukur pelaksanaan dibanding standar dan
3. Mengambil tindakan koreksi kepada penyimpangan dari standar dan rencana.

Penetapan alat ukur sangat dibutuhkan untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan pada tahap awal sehingga pekerjaan akan dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk membandingkan pekerjaan dan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan standar pengukuran antara pelaksanaan dengan hasil yang telah dicapai. Tindakan koreksi juga perlu diambil agar tidak terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan Terry (1960 : 484) : berpendapat bahwa proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mengukur pelaksanaan.
2. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan memastikan perbedaannya jika ada.

3. Mengambil tindakan koreksi kepada penyimpangan yang tidak baik yang dimaksudkan sebagai tindakan perbaikan.

Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan Newman (dalam Siagian, 1976: 420) mengemukakan tiga langkah dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu :

1. Menentukan standar yang menggambarkan maksud dari pelaksanaan
2. Membandingkan hasil yang senyatanya dengan standar
3. Mengambil tindakan perbaikan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan ditemui beberapa tahap yaitu : menentukan alat ukur, mengadakan penilaian atau membandingkan hasil pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditentukan kemudian mengadakan tindakan perbaikan jika ditemui penyimpangan.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di setiap instansi atau kantor pemerintah. Hal ini dikarenakan peran pengawasan menempati posisi strategis dalam rangka memantau pekerjaan yang akan, sedang, dan telah selesai. Dalam setiap diri manusia ada berbagai kelemahan yang kalau tidak ada unsur pengawasan akan terjadi suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Belum lagi pembengkakan biaya dalam suatu kegiatan apabila unsur pengawasan dikesampingkan. Anggapan bahwa aspek pengawasan mencari-cari kesalahan dalam setiap kegiatan pengawasan terkandung

maksud agar kegiatan yang sedang berjalan tidak keluar dari kebijakan yang telah ditentukan semula. Hal yang perlu diingat dalam setiap pengawasan hasil atau koreksi hendaklah ditindak lanjuti secara tegas, jelas dan ada unsur sanksi bagi yang melanggar.

Oleh karena itu agar pengawasan benar-benar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, maka dalam pelaksanaan hendaknya mengikuti proses kegiatan seperti tersebut diatas.

Kata pengawasan di dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kurang lebih mampu mengetahui secara cermat dan seksama. Pengawasan merupakan fungsi yang penting dalam management, ia diharapkan mampu mengetahui secara cermat dan seksama mengenai kenyataan dari obyek yang diawasi. Pengawasan ibarat mata dan telinga dari seorang manajer, sebagai mata ia harus mampu melihat secara cermat dan sebagai telinga ia harus mampu mendengar dengan seksama yang akhirnya pengawasan harus mampu merekam fakta dari obyek yang diawasi. Fakta dari obyek yang diawasi ini kemudian oleh pemimpin digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan dan tindakan selanjutnya.

Supaya tidak mengaburkan pengertian tentang pengawasan di dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan pendapat dari beberapa pakar manajemen. Terry (1960 : 136) menyebutkan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya

dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Dari definisi tersebut diatas ada tindakan korektif yang tegas apabila ditemukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tindakan korektif ini perlu agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan rencana semula.

Kemudian Fayol (dalam Siagian ,1976: 107) : mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : “Secara garis besar pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu sesuai benar dengan rencana yang diambil, perintah yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang dikeluarkan. Pengawasan juga dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu benda, orang dan tindakan”.

Dari definisi itu pengawasan meliputi aspek yang lebih luas bukan hanya bagi petugas atau pegawai suatu instansi tetapi banyak hal yang bisa masuk dalam unsur pengawasan seperti tentang benda atau tindakan. Aspek manusia bukan satu-satunya unsur dalam suatu pengawasan. Terkadang dalam hal pengawasan manusia hanya menjadi satu tolak ukur dalam penentuan keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Perlu diingat definisi tersebut diatas juga menekankan pada unsur benda atau tindakan sebagai acuan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu

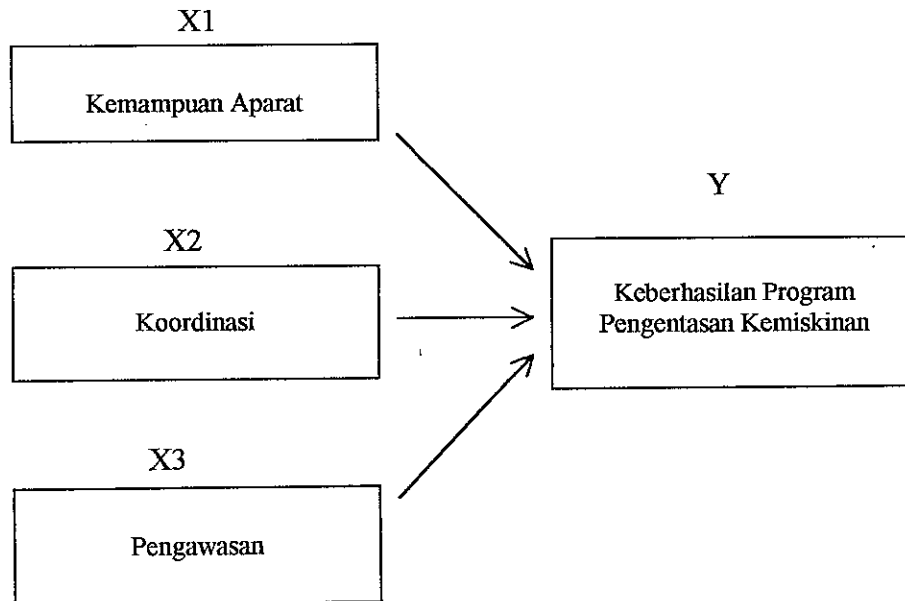
pekerjaan. Hal lain yang perlu dipahami adalah pengawasan berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan agar tidak terulang pada kegiatan berikutnya, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, biaya, maupun pikiran. Pendek kata pengawasan adalah langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa lebih efektif dan sesuai standar yang telah ditentukan.

Selanjutnya Mukiyat (1984 : 17) : memberikan definisi tentang pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan tugas, apakah sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, kemudian menilai atau mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan andai kata perlu diadakan tindakan korektif / perbaikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan pengawasan meliputi semua hal baik benda, orang maupun tindakan.

Adapun alasan dasar / utama perlunya diadakan pengawasan ada empat alasan yang dikemukakan oleh Terry (1960 : 104) Kesalahan manusia, Hasil yang tidak diharapkan , Ketidaktentuan dan Kegagalan.

Berdasarkan uraian teoritis, maka kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini dapat tergambar secara geometris sebagai berikut :



Keterangan :

- X 1 : Variabel Bebas (Pengaruh 1)
- X 2 : Variabel Bebas (Pengaruh 2)
- X 3 : Variabel Bebas (Pengaruh 3)
- Y : Variabel Tergantung (Terpengaruh)

B. Hipotesis

1. Ada hubungan positif dan signifikan antara kemampuan pelaksana program dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

2. Ada hubungan positif dan signifikan antara koordinasi dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.
3. Ada hubungan positif dan signifikan antara pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.
4. Ada hubungan positif dan signifikan antara kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan dengan keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan type penelitian kuantitatif dengan melakukan kajian kecenderungan hubungan antara masing-masing variabel yang diuji. Guna mempertajam dalam analisis maka akan dilakukan juga kajian yang bersifat kualitatif. Hasil pembahasan data-data kualitatif ini akan memberikan gambaran yang lebih bermakna atas temuan-temuan yang bersifat kuantitatif.

B. Ruang Lingkup

Fokus Penelitian ini hanya akan membatasi analisis pada faktor-faktor antara lain (1) Kemampuan Pelaksana Program, (2) Koordinasi, (3) Pengawasan dan (4) Keberhasilan Pelaksanaan Program. Secara spesifik penelitian ini akan mengkaji beberapa kelompok masyarakat pelaksana program PDMDKE dengan mengkonsentrasikan analisis hubungan masing faktor dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam analisis fenomena sosial yang ingin di kaji sesuai dengan substansi yaitu evaluasi kebijakan program PDMDKE. Disamping itu, lokasi

penelitian memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau penelitian dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data atau kemudahan untuk memperoleh data di lokasi penelitian. Dengan pemikiran tersebut diatas, penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

D. Variabel Penelitian.

1. Klasifikasi variabel.

Penelitian ini menetapkan 3 variabel bebas (X) yaitu kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan serta variabel terikat (Y) yaitu keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE.

2. Definisi konseptual.

- a. Keberhasilan pelaksanaan program adalah sebuah program yang mempunyai kejelasan dalam penentuan kelompok sasaran, dilakukan dengan cara yang benar serta memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Kemampuan pelaksana program adalah seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pelaksana berupa pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki.
- c. Koordinasi suatu usaha kelompok yang teratur guna mencapai hasil dengan melakukan tindakan bersama-sama sesuai dengan tanggungjawab yang telah ditentukan.

- d. Pengawasan adalah proses pengamatan kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Definisi operasional

- a. Keberhasilan pelaksanaan program akan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumberdaya, sikap positif kelompok sasaran dan struktur birokrasi yang transparan dan fleksibel. Variabel ini akan di ukur dengan indikator sebagai berikut :

- Tingkat pemahaman isi program
- Tingkat pemahaman terhadap isi program
- Tingkat pemahaman manfaat program
- Tingkat kejelasan pedoman pelaksanaan
- Tingkat kesinambungan
- Tingkat kejelasan program
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program
- Tingkat kesamaan persepsi antar instansi
- Tingkat kepatuhan masyarakat
- Tingkat kekuatan memaksa produk hukum
- Tingkat kewenangan untuk menindak lanjuti peraturan
- Tingkat intensitas kegiatan promosi

- b. Kemampuan pelaksana program adalah suatu kemampuan yang meliputi kecakapan fisik dan mental ini dapat di ukur dengan indikator:

- Tingkat Pendidikan
- Tingkat pengetahuan program
- Tingkat pengalaman kerja

- Tingkat kemampuan interaksi
 - Tingkat konseptual
 - Tingkat kemampuan administrasi
- c. Koodinasi adalah suatu keselarasan aktivitas antar satuan organisasi. Variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
- Tingkat kesatuan gerak dalam organisasi
 - Tingkat pelaksanaan komunikasi program
 - Tingkat kesatuan dalam pemahaman kebijakan
 - Tingkat keterpaduan tindakan program
 - Tingkat penyebaran informasi kebijakan
- d. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan agar supaya pekerjaan yang dilaksanakan dapat sesuai rencana. Variabel ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut :
- Tingkat kejelasan terhadap tujuan
 - Tingkat pemahaman terhadap norma pengawasan
 - Tingkat pemahaman terhadap prosedur kerja
 - Tingkat pengetahuan terhadap evaluasi kegiatan
 - Tingkat pemahaman terhadap kesalahan program
 - Tingkat penyimpangan program

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu :

- a. Data Kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka-angka, skala-skala, tabel, dan formula. Data-data ini akan dikumpulkan antara lain

melalui daftar pertanyaan, dokumen-dokumen program serta data-data dari dinas/lembaga terkait.

- b. Data Kualitatif, yaitu data-data yang berkaitan dengan konsep, pandangan, nilai budaya tentang sebuah fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diajukan perlu dicari data-data-data yang mendukung. Adapun sumber data yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini seluruh aparatur pelaksanaan Program PDMDKE di Kecamatan Banyumanik.

- b. Sumber Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, makalah, laporan, arsip, monografi dan lain-lain yang berkaitan dengan beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan program PDMDKE.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menyusun daftar pertanyaan yang mengacu kepada variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian adalah merupakan pengukuran terhadap fenomena sosial, oleh karena untuk mengukur fenomena tersebut peneliti pada prinsipnya

akan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian secara spesifik terhadap variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran ordinal yaitu memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan yang paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) skor ini bersifat membedakan dan mengurutkan tetapi tidak memberikan jarak yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot jawaban pertanyaan. Pedoman untuk pengukuran adalah jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skor 1 dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 4 (empat). Didalam jawaban pertanyaan akan berlaku aturan, dimana bobot skor yaitu :

A = 4 (empat)

B = 3 (tiga)

C = 2 (dua)

D = 1 (satu)

Dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria :

1. kategori jawaban yang sangat mendukung diberikan skor 4 (empat)
2. kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 3 (tiga)
3. kategori jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2 (dua)
4. kategori jawaban yang tidak mendukung diberikan skor 1 (satu)

G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

- a. Populasi adalah merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Anton Dayan,1996:110) sehingga dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh pegawai yang terlibat pelaksanaan program PDMDKE di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- b. Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian, (Anton Dayan,1996:65) Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *Proportional Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan pada secara proporsional mengingat populasi penelitian terdiri dari berbagai pelaksana program pada tingkat kelurahan. Menurut Suharsimi Arikunto,(1998:120) untuk menentukan besarnya sampel apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih baik populasinya diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi sedangkan jika jumlahnya lebih besar dari 100 dapat diambil diantara 15%-20% atau 25%-30%. Dengan berpedoman pendapat tersebut maka sebetulnya populasi ini hampir mendekati 100. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan tingkat kesalahan 5% dengan jumlah populasi 105 maka jumlah sampel dapat diambil 50%. Dari jumlah ini maka dilakukan pembagian secara proporsional berdasar jumlah Pokmas dan masing –masing Pokmas diambil tiga (3) orang untuk mewakili Pokmas yang bersangkutan masing-masing ketua, sekretaris, dan anggota sehingga jumlah responden secara

keseluruhan adalah 153 orang . Adapun perincian populasi sampling adalah tersebut dibawah ini :

Tabel.3.1.
Jumlah Populasi dan Sampel

NO.	KELURAHAN	JUMLAH POKMAS	JUMLAH SAMPEL (50%)
1.	Tinjomoyo	6	3
2	Ngesrep	8	4
3	Sumurboto	4	2
4	Srondol Kulon	12	6
5	Srondol Wetan	20	10
6	Banyumanik	10	5
7	Padalangan	9	4
8	Padangsari	16	8
9	Pudak Payung	10	5
10	Jabungan	5	2
11	Gedawang	5	2
	Jumlah	105	51

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi :

1. Penyebaran instrumen penelitian / *questionnaire*

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden / sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis / angket.

Sasaran penyebaran instrumen secara tertulis.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan/*guided interview* dan *in- depth interview*.

3. Observasi,

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai cara dengan melakukan pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena yang diteliti yaitu melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder)

I. Teknik Analisa Data

Dalam menguji hipotesis, penelitian ini melakukan analisis hubungan masing-masing variabel yang diuji dengan variabel dependen adalah keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE (Y) dan Variabel independen adalah variabel kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan. Sebelum melakukan analisis maka perlu lebih dilakukan proses editing data guna mendapatkan data yang tepat. Hasil jawaban responden tersebut kemudian dilakukan proses tabulasi. Tabulasi data tersebut dilakukan dengan merubah jawaban responden menjadi kuantitatif melalui penggunaan skala

ordinal. Selanjutnya angka-angka yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode statistik sebagai berikut :

1. Menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendeskripsikan jawaban responden yang diperoleh baik mengenai kemampuan pelaksanaan program, koordinasi dan pengawasan.
2. Menggunakan teknik korelasi untuk menganalisis hubungan kemampuan pelaksana program, koordinasi dan pengawasan. Disamping itu dilakukan pula korelasi parsial guna menentukan faktor yang paling dominan dari ketiga variabel independen.

Analisa yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah kolerasi *Rank Kendal* (RS) untuk kolerasi tunggal, sedangkan untuk kolerasi ganda (secara bersama-sama) menggunakan metode *Konkordansi Kendall*. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Korelasi Rank Kendall

Rumus ini gunakan untuk menguji hipotesa minor yaitu hubungan antara X_1 dengan X_2 dengan X_3 dan dengan Y, adapun rumusnya sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N - 1)}}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank Kendall antara variabel x dan y

S = Jumlah observasi skor untuk semua pasangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada x dan y

Apabila terdapat banyak nilai yang sama pada observasi x dan y, maka rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N - 1) - T_x \frac{1}{2} N (N - 1) - T_y}}$$

Keterangan :

T_x = banyak observasi berangka sama dengan tiap kelompok angka sama pada variabel x

T_y = banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel y

Untuk uji signifikansinya dengan menggunakan rumus Z-test, maka karena N penelitian lebih besar dari 10, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N + 1)}{9N(N - 1)}}$$

Kemudian harga Z di konsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila $Z_o \geq Z_t$ pada taraf signifikan 1%, sangat signifikan, hipotesa diterima
- b. Apabila $Z_o \leq Z_t$ pada taraf signifikan 5%, berarti sangat signifikan, hipotesa diterima

- c. Apabila $Z_o \geq Z_t$ pada taraf signifikan 5%, berarti tidak signifikan, hipotesa ditolak

$$W = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} K^2 (N - N) - K \Sigma T}}$$

T = faktor korelasi

T = banyaknya observasi dalam satu kelompok yang memperoleh angka sama untuk ranking tertentu.

Σ = Mengarahkan menjumlahkan semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking.

Untuk menguji signifikansi Koefisien Koordinat Kendall, perlu diadakan test dengan rumus :

$$X^2 = K (N - 1) W$$

Keterangan :

X^2 = Rest Chi Square

W = Koefisien Konkordasi Kendall

Kemudian hasil perhitungan X^2 tersebut dikonsultasikan terhadap harga Kristis Chi Quare dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika X^2 hitung $\geq X^2$ 1% maka sangat signifikan
- Jika X^2 hitung $\leq X^2$ t maka hubungan signifikan.
- Jika X^2 hitung $\leq X^2$ t maka hubungan tersebut tidak signifikan.

Selanjutnya untuk melihat kemampuan Variabel bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (W^2). Jika W^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (*mendekati satu*), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika W^2 menunjukkan semakin kecil (*mendekati nol*), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (W^2) berada antara 0 dan 1 atau $0 \leq W^2 \leq 1$.

BAB IV
DETERMINAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Karakteristik Wilayah Kecamatan Banyumanik

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Kecamatan Banyumanik merupakan salah 1 (satu) kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan di Kota Semarang mempunyai luas 2.509,98 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Banyumanik seluruhnya adalah 103.473 jiwa terdiri dari 53.445 laki-laki 51.028 perempuan yang tertampung dalam 23.416 KK meliputi 106 RW dan 649 RT.

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Banyumanik sangat bervariasi, tetapi melihat kondisi wilayah maka ada 2 jenis mata pencaharian yang kosong yaitu nelayan dan sektor perkebunan besar / kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	3.731 orang
2	Nelayan	-
3	Pengusaha Besar / Sedang	461 orang
4	Pengrajin / industri kecil	593 orang
5	Buruh Bangunan	7949 orang
6	Buruh Industri	13.218 orang
7	Perkebunan besar / kecil	-
8	Pedagang	3.220 orang
9	Pengangkutan	1.912 orang
10	Pegawai Negeri Sipil	14.086 orang
11	Pensiunan (ABRI / SIPIL)	4.029 orang
	Jumlah	49.139 orang

Sumber : Kecamatan Banyumanik Dalam Angka, 2001.

Data diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian di Kecamatan Banyumanik cukup beragam yaitu mulai dari petani hingga pensiunan ABRI. Kondisi ini terjadi karena Kecamatan Banyumanik merupakan pusat pemukiman penduduk di Kota Semarang terutama setelah daerah pemukiman yang ada di pusat kota mulai tidak banyak diminati karena seringnya terjadi bencana banjir.

Di bidang pendidikan, penduduk di Kecamatan Banyumanik sebagian besar sudah mengenyam pendidikan dan hanya sebagian kecil yang masih buta huruf sebanyak 2.109 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	4.125 orang
2	Tidak tamat SD	3.720 orang
3	Tamat SD / Sederajat	23.000 orang
4	Tamat SLTP / Sederajat	23.215 orang
5	Tamat SLTA / Sederajat	19.207 orang
6	Tamat Akademi / Sederajat	5.235 orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	8.113 orang
8	Buta Huruf	2.109 orang
	Jumlah	88.724 orang

Sumber : Kecamatan Banyumanik Dalam Angka, 2001.

Berdasarkan data mengenai tingkat pendidikan diatas maka terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Banyumanik mempunyai pendidikan dibawah SLTP. Kondisi ini telah menyebabkan bahwa sosialisasi program PDMDKE sebetulnya tidak banyak dipahami sebagai akibat rendahnya pemahaman penduduk terhadap program PDMDKE.

Pada bidang kependudukan yang dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah berumur dewasa atau diatas 20 tahun. Komposisi ini akan membawa konsekuensi bahwa sebagian besar penduduk telah masuk dalam usia kerja. Data Kelompok umur di Kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3.

Jumlah Penduduk menurut komposisi umur :

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0 – 6 tahun	8.568 orang
2.	7 – 12 tahun	10.284 orang
3.	13 – 19 tahun	11.450 orang
4.	20 – 24 tahun	11.337 orang
5.	25 – 55 tahun	31.026 orang
6.	56 – 79 tahun	17.474 orang
7.	80 tahun keatas	13.334 orang
	Jumlah	103.473 orang

Sumber : Kecamatan Banyumanik Dalam Angka, 2001.

B. Pelaksanaan Keberhasilan Program PDMDKE

Pembahasan terhadap keberhasilan pelaksanaan Program PDMDKE di Kecamatan Banyumanik akan terkonsentrasi pada pandangan masyarakat terhadap manajemen pelaksanaan program. Salah satu indikator yang penting adalah dengan menanyakan kepada masyarakat tentang PDMDKE mampu membantu ekonomi masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap program ini dapat terlihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel .4.4.

PDMDKE dapat membantu ekonomi masyarakat

Keterangan	n	%
Sangat setuju	43	28,1
Setuju	92	60,1
Kurang setuju	14	9,2
Tidak setuju	4	2,6
Total	153	100,0
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.1

Berdasarkan data pada Tabel.4.4.diatas yang menggambarkan tentang pandangan masyarakat terhadap bantuan dari Program PDMDKE menunjukkan bahwa terdapat 28,1% yang mengatakan sangat setuju bahwa program PDMDKE mampu membantu ekonomi masyarakat, 60,1% mengatakan setuju, 9,2% kurang setuju dan 2,6% mengatakan tidak setuju. Diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana program PDMDKE setuju bahwa program PDMDKE dapat membantu ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan sulitnya mencari tambahan modal di saat krisis yang berkepanjangan.

Indikator lainnya yang menyangkut keberhasilan program adalah dengan melihat pandangan masyarakat tentang apakah program PDMDKE telah dianggap tepat dalam pemilihan sasaran program. Pandangan ini akan memberikan gambaran tentang apakah dalam pelaksanaan PDMDKE telah terjadi penyimpangan-penyimpangan pemilihan sasaran yang diketahui oleh masyarakat. Data secara rinci terlihat pada Tabel. 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5.

Ketepatan sasaran PDMDKE

Keterangan	n	%
Sangat tepat	22	14,4
Tepat	74	48,4
Kurang tepat	57	37,3
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.2.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat 14,4% yang mengatakan bahwa PDMDKE sangat tepat dalam pemilihan sasaran program , 48,4% mengatakan tepat, 37,3% kurang tepat. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana program PDMDKE setuju bahwa program PDMDKE tepat pada sasaran. Hal ini disebabkan karena pemilihan sasaran dalam program PDMDKE melalui proses yang panjang dan bertahap mulai dari RT, RW, Kelurahan sampai tingkat Kecamatan, sehingga sasaran harus benar – benar tepat baik orang maupun jenis usaha.

Indikator keberhasilan program lainnya adalah apakah PDMDKE bermanfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Semakin besar masyarakat yang menyatakan bahwa program PDMDKE bermanfaat bagi pembangunan ekonomi maka semakin besar kemungkinan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan program PDMDKE. Hasil tanggapan masyarakat terhadap manfaat program PDMDKE dapat terlihat pada Tabel 4.6. berikut ini :

Tabel .4.6.

Manfaat PDMDKE bagi pengembangan ekonomi

Keterangan	n	%
Sangat bermanfaat	21	13,7
Bermanfaat	104	68,0
Kurang bermanfaat	24	15,7
Tidak bermanfaat	4	2,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.3.

Berdasarkan data diatas maka menunjukkan bahwa terdapat 13,7% yang mengatakan program PDMDKE sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi, 68,0% mengatakan bermanfaat, 15,7% mengatakan kurang bermanfaat, 2,6 mengatakan tidak bermanfaat dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan program PDMDKE bermanfaat bagi pengembangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena upaya masyarakat sangat membutuhkan suntikan dana segar bagi pengembangan ekonomi rakyat di saat krisis ini.

Pemahaman pelaksana program terhadap pedoman pelaksanaan akan sangat menentukan dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat. Tanggapan dari masyarakat terhadap pedoman pelaksanaan dapat terlihat pada Tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7.
Kemudahan memahami pedoman pelaksanaan

Keterangan	n	%
Sangat mudah	9	5,9
Mudah	82	53,6
Cukup mudah	54	35,3
Tidak mudah	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.4.

Berdasarkan Tabel 4.7. diatas maka terlihat bahwa terdapat 5,9% yang mengatakan pedoman pelaksanaan program PDMDKE sangat mudah dipahami, 53,6% mengatakan mudah dipahami, 35,3% mengatakan cukup mudah dipahami, 5,2% mengatakan tidak mudah dipahami dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedoman pelaksanaan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena program PDMDKE sudah dirancang sedemikian rupa (sederhana dan tidak berbelit – belit) sehingga warga masyarakat mudah untuk memahami.

Pandangan masyarakat terhadap penyimpangan program merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan suatu program. Program. Penyimpangan-penyimpangan ini tentu saja sangat berkaitan dengan transparansi dana, pemilihan sasaran program serta pertanggungjawaban pelaksanaan program. Hasil penelitian tentang tingkat penyimpangan program dapat terlihat pada Tabel 4.8. berikut ini :

Tabel 4.8.

Tingkat penyimpangan program

Keterangan	n	%
Sangat besar	2	1,3
Besar	28	18,3
Cukup	54	35,3
Kecil	69	45,1
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.B.5.*

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,3% yang mengatakan program PDMDKE sangat besar tingkat penyimpangan programnya, 18,3% mengatakan besar, 35,3 mengatakan cukup, 45,1% mengatakan kecil. Deskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa tingkat penyimpangan program kecil. Hal ini disebabkan karena pengawasan antar warga masyarakat penerima bantuan sangat kuat (rumah berdampingan) yang disebut dengan pengawasan informal yang mempunyai efek psikologis yang sangat kuat.

Tabel .4.9.

Kemampuan PDMDKE utk kreatifitas program

Keterangan	n	%
Sangat mampu	9	5,9
Mampu	66	43,1
Kurang mampu	70	45,8
Tidak mampu	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.6.

Tabel 4.9. diatas menunjukkan bahwa terdapat 5,9% yang mengatakan program PDMDKE sangat mampu untuk kreatifitas program, 43,1% mengatakan mampu, 45,8% mengatakan kurang mampu, 5,2% mengatakan tidak mampu dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kreatifitas program PDMDKE kurang mampu. Hal ini disebabkan karena jenis usaha dan modal usaha di wilayah RT, RW dibagi secara rata (unsur keadilan dan monitoring) sehingga kreatifitas masyarakat kurang berkembang.

Setiap pelaksanaan program terutama berkaitan dengan masalah kemiskinan maka akan selalu menemui berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketepatan dalam pemilihan sasaran program , hal ini sebagian besar disebabkan belum adanya ukuran kemiskinan yang baku. Tanggapan pelaksana program terutama berkaitan dengan tingkat kesulitan pemilihann sasaran dapat terlihat pada Tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10.

Tingkat kesulitan penentuan sasaran

Keterangan	n	%
Sangat besar	2	1,3
Besar	26	17,0
Cukup	75	49,0
Kecil	50	32,7
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.B.7*

Berdasarkan distribusi Tabel 4.10 tersebut maka telah menunjukkan bahwa terdapat 1,3% yang mengatakan tingkat kesulitan penentuan sasaran program PDMDKE sangat besar, 17,0% mengatakan besar, 49,0% mengatakan cukup, 32,7% mengatakan kecil dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kesulitan penentuan sasaran program PDMDKE cukup. Hal ini disebabkan warga masyarakat di wilayah RT, RW sudah lama mengenal satu dengan yang lain sehingga penentuan sasaran menjadi mudah.

Selain masalah dalam penentuan sasaran maka pemahaman masyarakat terhadap kejelasan prosedur pelaksanaan program merupakan indikator penting lainnya dalam setiap pelaksanaan program. Data tentang tanggapan responden terhadap kejelasan prosedur pelaksanaan program PDMDKE dapat terlihat pada Tabel 4.11. berikut ini :

Tabel .4.11.
Kejelasan PDMDKE dlm prosedur

Keterangan	N	%
Sangat jelas	10	6,5
Jelas	98	64,1
Kurang jelas	45	29,4
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.8.

Hasil penelitian menunjukkan ada 6,5% yang mengatakan program PDMDKE sangat jelas dalam prosedur, 64.1% mengatakan jelas, 29,4% mengatakan kurang jelas dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan prosedur program PDMDKE jelas. Hal ini disebabkan karena program PDMDKE menggunakan prosedur yang sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sementara dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program PDMDKE merupakan indikator yang perlu dikaji. Data tentang hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.12. berikut ini :

Tabel .4.12.
Dukungan masy. thd PDMDKE

Keterangan	n	%
Sangat mendukung	26	17,0
Mendukung	99	64,7
Kurang mendukung	20	13,1
Tidak mendukung	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.9.

Data tentang dukungan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat 17,0% yang mengatakan masyarakat sangat mendukung program PDMDKE, 64,7% mengatakan mendukung, 13,1% mengatakan kurang mendukung, 5,2% mengatakan tidak mendukung dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung program PDMDKE. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk menghidupkan lagi perekonomian rakyat di wilayah RT dan RW.

Tabel .4.13.

Pemahaman masy. pd PDMDKE

Keterangan	n	%
Sangat memahami	6	3,9
Memahami	87	56,9
Kurang memahami	57	37,3
Tidak memahami	3	2,0
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.B.10.*

Tabel 4.13. menggambarkan bahwa ada 3,9% yang mengatakan masyarakat sangat memahami terhadap program PDMDKE, 56,9% mengatakan memahami, 37,3% mengatakan kurang memahami, 2,0% mengatakan tidak memahami dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami program PDMDKE. Hal ini disebabkan karena program PDMDKE menggunakan metode pemahaman yang dilakukan oleh RT dan RW, sehingga interaksi akan berlangsung dengan lancar.

Tabel .4.14.

Keseringan beda persepsi antar instansi

Keterangan	n	%
Sangat sering	9	5,9
Sering	48	31,4
Kurang sering	29	19,0
Jarang	67	43,8
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.II.

Tabel 4.14. yang menggambarkan tentang tingkat keseringan berbeda persepsi dengan instansi terkait menunjukkan bahwa terdapat 5,9% yang mengatakan sangat sering beda persepsi dengan instansi, 31,4% mengatakan sering, 19,0% mengatakan kurang sering, 43,8% mengatakan jarang dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar beda persepsi antar instansi jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena instansi yang berkecimpung di dalam program PDMDKE menggunakan bahasa koordinasi dan pelayanan satu atap sehingga persepsi ke masyarakat akan menjadi sama.

Tabel .4.15.

Tingkat kepatuhan masy. pd pelaksanaan

Keterangan	n	%
Sangat baik	6	3,9
Baik	58	37,9
Kurang baik	76	49,7
Tidak baik	13	8,5
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.B.12.*

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa terdapat 3,9% yang mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan sangat baik, 37,9% mengatakan baik, 49,7% mengatakan kurang baik, 8,5% mengatakan tidak baik dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kepatuhan masyarakat pada pelaksanaan kurang baik. Hal ini disebabkan karena sangsi yang diterapkan kurang jelas dan tegas dari pelaksana program, sehingga penerima bantuan tidak patuh kepada apa yang telah disepakati bersama.

Kejelasan program PDMDKE dalam aturan pelaksanaannya merupakan dimensi pokok yang perlu digali. Adanya kejelasan dalam aturan pelaksanaan akan sangat membantu dalam melaksanakan program yang telah ditentukan. Hasil penelitian tentang tanggapan masyarakat terhadap kejelasan aturan pelaksanaan program PDMDKE dapat terlihat pada Tabel 4.16. berikut ini :

Tabel .4.16.

Kejelasan PDMDKE dlm aturan pelaksanaan

Keterangan	n	%
Sangat jelas	14	9,2
Jelas	97	63,4
Kurang jelas	37	24,2
Tidak jelas	5	3,3
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.B.13.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 9,2% yang mengatakan program PDMDKE sangat jelas dalam aturan pelaksanaan, 63,4% mengatakan jelas, 24,2% mengatakan kurang jelas, 3,3% mengatakan tidak jelas dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan program PDMDKE aturan pelaksanaannya jelas. Hal ini disebabkan karena dalam aturan pelaksanaan dibuat sangat sederhana dan mudah untuk dipahami.

Tabel .4.17.

Kejelasan wewenang bagi lembaga pelaksana

Keterangan	n	%
Sangat jelas	6	3,9
Jelas	92	60,1
Kurang jelas	55	35,9
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.14.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kejelasan wewenang bagi lembaga pelaksana menunjukkan bahwa terdapat 3,9% yang mengatakan wewenang bagi lembaga pelaksana sangat jelas, 60,1% mengatakan jelas, 35,9% mengatakan kurang jelas dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wewenang bagi lembaga pelaksana jelas. Hal ini disebabkan karena lembaga pelaksana sudah diberi lahan kewenangan masing – masing dan tidak saling mencampuri satu sama lain.

Tabel .4.18.

Intensitas promosi program PDMDKE

Keterangan	n	%
Sangat intensif	7	4,6
Intensif	64	41,8
Kurang intensif	75	49,0
Tidak intensif	7	4,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.B.15

Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 4,6% yang mengatakan promosi program PDMDKE sangat intensif, 41,8% mengatakan intensif,

49,0% mengatakan kurang intensif, 4,6% mengatakan tidak intensif dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar promosi program PDMDKE kurang intensif. Hal ini disebabkan karena waktu pelaksanaan program yang jadwalnya sangat ketat, sehingga masyarakat terkadang ada yang tidak menerima informasi karena kesibukan sehari – hari.

C. Kemampuan Pelaksana Program

Salah satu indikator keberhasilan kemampuan pelaksana program dapat dilihat dari tingkat pendidikan pelaksana program. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mendukung bagi pelaksanaan program. Data tentang latar belakang pendidikan pelaksana program dapat terlihat pada Tabel 4.19. berikut ini :

Tabel 4.19.

Tingkat pendidikan pelaksana program

Keterangan	n	%
Sangat memadai	7	4,6
Memadai	100	65,4
Kurang memadai	46	30,1
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.C.1.*

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 4,6% yang mengatakan tingkat pendidikan pelaksana program sangat memadai, 65,4% mengatakan memadai, 30,1% mengatakan kurang memadai dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan pelaksana

program memadai. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan pelaksana program adalah orang – orang pilihan yang telah diseleksi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga mampu mengorganisir warga penerima bantuan.

Tabel .4.20.
Tingkat pengetahuan pelaksana program

Keterangan	N	%
Sangat memadai	2	1,3
Memadai	87	56,9
Kurang memadai	56	36,6
Tidak memadai	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.C.2.*

Tabel 4.20. diatas memperlihatkan bahwa terdapat 1,3% yang mengatakan tingkat pengetahuan pelaksana program sangat memadai, 56,9% mengatakan memadai, 36,6% mengatakan kurang mampu, 5,2% mengatakan tidak mampu dan diskripsi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaksana program memadai. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan pelaksana program adalah orang yang telah diseleksi oleh kelurahan dan diperkuat oleh kecamatan. Meskipun demikian tingkat pelaksana program yang dianggap kurang memadai cukup besar, oleh sebab itu kemungkinan dalam pemilihan pelaksana program sangat ditentukan pula oleh tingkat kesedian masyarakat untuk menjadi pelaksana program.

Tabel .4.21.

Tingkat pengalaman kerja yg dimiliki pelaksana

Keterangan	n	%
Sangat mendukung	20	13,1
Mendukung	75	49,0
Kurang mendukung	50	32,7
Tidak mendukung	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.C.3.

Berdasarkan Tabel 4.21. diatas maka terlihat bahwa terdapat sekitar 13,1% yang mengatakan tingkat pengalaman kerja yang dimiliki pelaksana sangat mendukung, 49,0% mengatakan mendukung, 32,7% mengatakan kurang mendukung, 5,2% mengatakan tidak mendukung dan diskripsi ini menunjukkan bahwa tingkat pengalaman kerja yang dimiliki pelaksana mendukung. Hal ini disebabkan karena pengalaman bekerja dari aparat pelaksana program sudah melalui tahap seleksi, sehingga keahliannya tidak diragukan lagi.

Tabel .4.22.

Kemampuan interaksi pelaksana program

Keterangan	n	%
Sangat baik	11	7,2
Baik	98	64,1
Kurang baik	32	20,9
Tidak baik	12	7,8
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.C.4.

Tabel 4.22. yang menunjukkan kemampuan pelaksana program dalam berinteraksi dengan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat 7,2% yang mengatakan kemampuan interaksi pelaksana program sangat baik, 64,1% mengatakan baik, 20,9% mengatakan kurang baik, 7,8% mengatakan tidak baik dan diskripsi ini menunjukkan bahwa kemampuan interaksi pelaksana program baik. Hal ini disebabkan karena pelaksana program dipilih dari orang – orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan dekat dengan warga penerima bantuan.

Disamping kemampuan pelaksana program maka setiap pelaksana harus mempunyai kemampuan untuk berpikir. Hasil penelitian tentang kemampuan berikir ini dapat terlihat pada Tabel 4.23 berikut ini :

Tabel 4.23.

Persetujuan ttg kematangan pikiran pelaksana

Keterangan	n	%
Sangat setuju	45	29,4
Setuju	89	58,2
Kurang setuju	11	7,2
Tidak setuju	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.C.5.

Tabel 4.23. diatas menunjukkan bahawa ada sekitar 29,4% yang mengatakan sangat setuju tentang kematangan pikiran pelaksana, 58,2% mengatakan setuju, 7,2% mengatakan kurang setuju, 5,2% mengatakan tidak setuju dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden setuju tentang kematangan pikiran pelaksana. Hal ini disebabkan karena ada beban moril dari pelaksana program untuk mengembangkan program yang lebih baik dan menyentuh kehidupan masyarakat penerima bantuan.

Tabel .4.24.

Kemampuan administrasi pelaksana program

Keterangan	n	%
Sangat baik	11	7,2
Baik	81	52,9
Kurang baik	61	39,9
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.C.6.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 7,2% yang mengatakan kemampuan administrasi pelaksana program sangat baik, 52,9% mengatakan baik, 39,9% mengatakan kurang baik dan diskripsi ini menunjukkan bahwa kemampuan administrasi pelaksana program baik. Hal ini disebabkan karena pelaksana program sudah terbiasa dengan administrasi RT, RW sehingga penerapan ke program ini tidak terlalu sulit.

D. Koordinasi

Variabel koordinasi merupakan faktor yang dominan dalam setiap pelaksanaan program. Adanya koordinasi yang baik akan mampu meminimalisasi duplikasi program. Salah satu indikator koordinasi adalah tentang tingkat kejelasan dalam kesatuan gerak organisasi seperti terlihat pada Tabel 4.25 berikut ini :

Tabel .4.25.

Kejelasan dlm kesatuan gerak organisasi

Keterangan	n	%
Sangat jelas	14	9,2
Jelas	86	56,2
Kurang jelas	53	34,6
Total	153	100,0

Sumber : *Pertanyaan No.D.1.*

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 9,2% yang mengatakan kesatuan gerak organisasi dirasa sangat jelas, 56,2% mengatakan jelas, 34,6% mengatakan kurang jelas dan diskripsi ini menunjukkan bahwa kesatuan gerak organisasi jelas. Hal ini disebabkan karena ada pemahaman dan persepsi yang sama bahwa maju mundurnya organisasi sangat ditentukan oleh kesatuan gerak organisasi. Meskipun demikian amsih terdapat beberapa masalah yang sering terjadi dalam melaksanakan koordinasi. Ada beberapa kesan dimana instansi yang ditunjuk melaksanakan program merasa bahwa apa yang dilakukan merupakan hak utama, oleh sebab itu koordinasi disini kadang-kadang hanya berkisar pada

proses komunikasi program. Bahkan sering terjadi terdapat perbedaan utama dalam melaksanakan sebuah kegiatan bersama.

Tabel 4.26.

Kelancaran pelaksanaan komunikasi program

Keterangan	n	%
Sangat lancar	11	7,2
Lancar	77	50,3
Kurang lancar	56	36,6
Tidak lancar	9	5,9
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.D.2.

Data tentang tingkat kelancaran dalam proses komunikasi program yang tercermin dalam Tabel 4.26 di atas menunjukkan bahwa terdapat sekita 7,2% yang mengatakan pelaksanaan komunikasi program sangat lancar, 50,3% mengatakan lancar, 36,6% mengatakan kurang lancar, 5,9% mengatakan tidak lancar dan diskripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi program lancar. Hal ini disebabkan karena faktor komunikasi berperan sangat penting bagi pengembangan program PDMDKE, sehingga pelaksana progam mengembangkan komunikasi dua arah. Meskipun demikian ada beberapa responden yang menyatakan bahwa sebetulnya proses komunikasi yang terjadi dianggap tidak lancar. Hal ini dapat terjadi karena setiap instansi terkait mempunyai persepsi yang berbeda sehingga terkesan tiadk adanya proses komunikasi program.

Tabel .4.27.

Persetujuan Adanya Kesatuan Dlm Kebijakan

Keterangan	n	%
Sangat setuju	35	22,9
Setuju	94	61,4
Kurang setuju	24	15,7
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.D.3.

Tabel 4.27 diatas menunjukkan terdapat 22,9% responden mengatakan sangat setuju adanya kesatuan dalam kebijakan, 61,4% mengatakan setuju, 15,7% mengatakan kurang setuju dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju adanya kesatuan dalam kebijakan. Hal disebabkan karena pemahaman kebijakan dalam program akan membantu masyarakat untuk mengetahui secara pasti akan hak dan kewajibannya.

Tabel 4.28.

Persetujuan Adanya Kesamaan Tindakan Program

Keterangan	n	%
Sangat setuju	33	21,6
Setuju	100	65,4
Kurang setuju	20	13,1
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.D.4

Data yang ada pada Tabel 4.28 menunjukkan bahwa ada 21,6% responden mengatakan sangat setuju adanya kesamaan tindakan program,

65,4% mengatakan setuju, 13,1% mengatakan kurang setuju dan diskripsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju adanya kesamaan tindakan program. Hal ini disebabkan karena bantuan kepada masyarakat miskin bukan dana hibah tetapi harus digulirkan kepada warga yang lain yang juga berhak atas dana tersebut.

Tabel .4.29.

Kelanjutan Penyebaran Informasi
Kebijakan Program .

Keterangan	N	%
Sangat kontinyu	2	1,3
Kontinyu	61	39,9
Kurang kontinyu	83	54,2
Tidak kontinyu	7	4,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.D.5.

Tabel 4.29 diatas memperlihatkan bahwa terdapat 1,3% yang mengatakan penyebaran informasi kebijakan program sangat kontinyu, 39,9% mengatakan kontinyu, 54,2% mengatakan kurang kontinyu, 4,6% mengatakan tidak kontinyu dan diskripsi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi kebijakan program kurang kontinyu. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasana serta kemampuan managemen pelaksana program di tiap – tiap RT dan RW.

E. Pengawasan

Variabel pengawasan program merupakan faktor yang cukup dominan dalam proses pelaksanaan program. Salah satu indikator pengawasan adalah tingkat pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yang tercermin pada tabel 4.30 dibawah ini :

Tabel .4.30.

Tingkat Pengawasan Sesuai Peraturan

Keterangan	n	%
Sangat baik	11	7,2
Baik	78	51,0
Kurang baik	56	36,6
Tidak baik	8	5,2
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.1.

Tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa terdapat 7,2% yang mengatakan jalannya pengawasan sesuai peraturan sangat baik, 51,0% mengatakan baik, 36,6% mengatakan kurang baik, 5,2% mengatakan tidak baik dan diskripsi ini menunjukkan bahwa jalannya pengawasan sesuai peraturan baik. Hal ini disebabkan karena jadwal pengawasan sudah dibuat dalam suatu agenda jelas mengacu kepada peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.31.

Peran Pengawas Dalam Norma Pengawasan

Keterangan	n	%
Sangat besar	9	5,9
Besar	39	25,5
Kecil	61	39,9
Cukup	44	28,8
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.2.

Tabel 4.31. diatas menunjukkan ada 5,9% yang mengatakan peran pengawasan dalam norma pengawasan sangat besar, 25,5% mengatakan besar, 39,9% mengatakan kecil, 28,8% mengatakan cukup dan diskripsi ini menunjukkan bahwa peran pengawas dalam norma pengawasan kecil. Hal ini disebabkan karena pengawas kurang memahami arti pengawasan bagi pengembangan PDMDKE, ditambah lagi dengan kurangnya kemampuan aparat pelaksana.

Tabel .4.32.

Pemahaman prosedur kerja oleh masy.

Keterangan	n	%
Sangat mudah dipahami	3	2,0
Mudah dipahami	73	47,7
Kurang mudah dipahami	77	50,3
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.3.

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 2,0% yang mengatakan pemahaman prosedur kerja sangat dipahami oleh masyarakat, 47,7% mengatakan mudah dipahami, 50,3% mengatakan kurang mudah dipahami dan diskripsi ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mudah memahami prosedur kerja. Hal ini disebabkan karena prosedur kerja diterapkan masih memakai jam kerja birokrasi, sehingga akan tumpang tindih dengan pekerjaan sehari – hari masyarakat.

Tabel .4.33.

Pengetahuan pelaksana thd evaluasi kegiatan

Keterangan	n	%
Sangat tinggi	3	2,0
Tinggi	16	10,5
Cukup	127	83,0
Kurang	7	4,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.4.

Tabel 4.33. yang terfokus pada tingkat pengetahuan pelaksana terhadap proses evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 2,0% yang mengatakan pengetahuan pelaksana terhadap evaluasi kegiatan sangat tinggi, 10,5% mengatakan tinggi, 83,0% mengatakan cukup, 4,6% mengatakan kurang dan diskripsi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaksana terhadap evaluasi kegiatan cukup. Hal ini disebabkan karena pelaksana program adalah orang yang tahu seluk beluk organisasi, sehingga kegiatan akan dilakukan secara terus menerus demi kemajuan kelompoknya.

Tabel .4.34.

Pemahaman pelaksana thd kesalahan program

Keterangan	n	%
Sangat tinggi	2	1,3
Tinggi	22	14,4
Cukup	102	66,7
Kecil	27	17,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.5.

Tabel 4.34 menunjukkan terdapat 1,3% yang mengatakan pemahaman pelaksana terhadap kesalahan program sangat tinggi, 14,4% mengatakan tinggi, 66,7% mengatakan cukup, 17,6% mengatakan kecil dan diskripsi ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kesalahan program cukup. Hal ini disebabkan karena kesalahan program akan menghambat perguliran dana bagi warga yang lain, sehingga

pelaksana program akan menekan sekecil mungkin kesalahan yang mungkin timbul.

Tabel .4.35.

Penyimpangan program dlm pemilihan sasaran

Keterangan	n	%
Sangat besar	5	3,3
Besar	32	20,9
Cukup	63	41,2
Kecil	53	34,6
Total	153	100,0

Sumber : Pertanyaan No.E.6.

Berdasarkan Tabel 4.35 diatas maka terlihat bahwa terdapat 3,3% yang mengatakan penyimpangan program dalam pemilihan sasaran sangat besar, 20,9% mengatakan besar, 41,2% mengatakan cukup, 34,6% mengatakan kecil dan diskripsi ini menunjukkan bahwa penyimpangan program dalam pemilihan sasaran cukup. Hal ini disebabkan karena pemilihan sasaran dalam program PDMDKE memakai sistem Bottom Up Planning sehingga warga masyarakat akan lebih tahu jenis usaha apa yang paling cocok bagi mereka.

F. Kategorisasi Variabel Penelitian

Hasil penggambaran atau deskripsi yang telah disajikan dalam data-data dari masing-masing pertanyaan telah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi variabel yang diteliti. Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis maka diperlukan kategori berdasarkan skor masing-masing responden yang diteliti. Dalam penelitian ini telah diajukan tiga variabel bebas yaitu Kemampuan, Koordinasi dan Pengawasan, sedangkan variabel terikatnya adalah keberhasilan pelaksanaan Program PDMDKE. Pengukuran ini menggunakan skala ordinal dimana masing-masing jawaban diberi kode 1 untuk jawaban sangat baik hingga 4 untuk kategori tidak baik. Guna menyusun kategori tersebut maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{R}{K}$$

i = interval kelas

R = skor tertinggi - skor terendah

K = jumlah kelas

Setelah melakukan penghitungan terhadap skor masing-masing variabel (lampiran 2) maka dilakukan kategorisasi yaitu nilai terendah mempunyai kedudukan yang paling tinggi, sedangkan nilai terbanyak mempunyai kedudukan paling rendah. Perhitungan ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian tentang pelaksanaan program PDMDKE di Kecamatan Banyumanik.

Variabel keberhasilan pelaksanaan program PDMDKE merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan semua pertanyaan yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program maka total skor terendah adalah sebesar 15 dan skor tertinggi adalah 50. Nilai selisih antara nilai tertinggi dan terendah selanjutnya dibagi menjadi 4 kategori (*lihat lampiran.2*). Hasil kategorisasi variabel pelaksanaan program dapat terlihat pada Tabel 4.36 berikut ini :

Tabel 4.36.
Kategorisasi Variabel Pelaksanaan Program

Keterangan	Frek	%
Kurang baik	52	34,0
Cukup Baik	81	52,9
Baik	18	11,8
Sangat baik	2	1,3
Total	153	100,0

Kategorisasi variabel pelaksanaan program yang tercermin dalam Tabel 4.36 menunjukkan bahwa terdapat 34.0% yang masuk dalam kategori bahwa pelaksanaan program dianggap kurang baik, 52,9% menyatakan cukup baik, 11,8% yang menyatakan baik dan hanya 1,3% saja yang menyatakan bahwa program PDMDKE dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebaran skor pada variabel kemampuan setelah dilakukan perhitungan kategorisasi dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dimana nilai terendah adalah 6 dan tertinggi adalah 16 (lihat lampiran 2). Hasil kategorisasi pada variabel kemampuan dapat tercermin pada tabel 4.37 berikut ini :

Tabel 4.37

Kategorisasi Variabel Kemampuan

Keterangan	Freq	%
Kurang baik	18	11,8
Cukup	60	39,2
Baik	64	41,8
Sangat baik	11	7,2
Total	153	100

Tabel 4.37 diatas menunjukkan bahwa ada 11,8% yang menunjukkan bahwa kemampuan dalam program PDMDKE dianggap kurang baik,39,2% menyatakan cukup baik 41,8% yang menyatakan baik dan 7,2% yang menyatakan sangat baik.

Sementara untuk variabel koordinasi terdapat nilai terendah adalah 6 dan tertinggi adalah 20. Jarak antara nilai tertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 4 kelompok dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan (lihat lampiran 2). Hasil kategorisasi variabel koordinasi dapat terlihat pada Tabel 4.38 berikut ini :

Tabel 4.38
Kategorisasi Variabel Koordinasi

Keterangan	Frek	%
Kurang baik	37	24,2
Cukup baik	55	35,9
Baik	55	35,9
Sangat baik	6	3,9
Total	153	100,0

Hasil kategorisasi variabel koordinasi yang tersusun pada Tabel 4.38 diatas menunjukkan bahwa terdapat 24,2 % yang menyatakan bahwa koordinasi program PDMDKE dianggap kurang baik, 35,9% menyatakan cukup baik 35,9% yang menyatakan baik dan hanya 3,9% yang menyatakan sangat baik.

Variabel pengawasan yang merupakan salah satu variabel independen memperlihatkan bahwa skor terendah adalah 6 dan tertinggi 18. Sebaran ini kemudian dijadikan 4 kelompok dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan (lihat lampiran 2). Hasil kategori tersebut dapat terlihat pada Tabel 4.39 berikut ini :

Tabel 4.39
Kategori Variabel Pengawasan

Keterangan	Frek	%
Kurang baik	98	64,1
Cukup baik	42	27,5
Baik	11	7,2
Sangat baik	2	1,3
Total	153	100,0

Hasil kategorisasi pada variabel pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 64,1% yang menyatakan bahwa pengawasan dianggap kurang baik, 27,5% yang menyatakan cukup baik, 7,2% yang menyatakan baik dan hanya 1,3% yang menyatakan sangat baik. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa sebagian besar pengawasan dianggap kurang baik.

G. Uji Hipotesis

G.1. Hubungan Kemampuan dengan Pelaksanaan Program

Hubungan antara variabel kemampuan dengan pelaksanaan program menunjukkan bahwa responden yang masuk dalam kategori dengan kemampuan yang kurang baik maka terdapat 100% yang masuk mempunyai pelaksanaan yang kurang baik pula. Sedangkan mereka yang mempunyai tingkat kemampuan yang sangat baik maka terdapat 36,4% yang mempunyai pelaksanaan program pada kategori baik dan 18,2% yang masuk kategori sangat baik. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa tingkat kemampuan berhubungan secara langsung terhadap tingkat pelaksanaan program. Meskipun demikian, hubungan antara kedua variabel ini perlu dicermati lebih jauh dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Hasil tabel silang antara kedua variabel tersebut dapat terlihat secara rinci pada tabel 4.40 berikut ini :

Tabel. 4.40
 Hubungan antara kemampuan dengan pelaksanaan program PDMDKE

KEMAMPUAN	PELAKSANAAN PROGRAM				Total
	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat baik	
Kurang Baik	18 100,0%				18 100,0%
Cukup Baik	27 45,0%	30 50,0%	3 5,0%		60 100,0%
Baik	7 10,9%	46 71,9%	11 17,2%		64 100,0%
Sangat baik		5 45,5%	4 36,4%	2 18,2%	11 100,0%
Total	52 34,0%	81 52,9%	18 11,8%	2 1,3%	153 100,0%

Hasil uji statistik hubungan antara kemampuan dengan pelaksanaan program menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall tercermin pada Tabel 4.41. berikut ini :

Tabel. 4.41
 Uji Kendall Antara Kemampuan dengan Pelaksanaan Program PDMDKE

		Value	Asymp. Std. Error	Approx. T	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,824	,049	9,814	,000
N of Valid Cases		153			

Hasil korelasi antara kedua variabel tersebut menunjukkan koefisien 0,824. Hasil ini mencerminkan bahwa kedua variabel ini

berhubungan secara positif dimana semakin tinggi tingkat kemampuan maka akan diikuti semakin tinggi pula tingkat pelaksanaan program. Sedangkan untuk menguji tingkat kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka perlu dilihat nilai T hitung dimana koefisien T hitung sebesar 9,814. Sedangkan harga T tabel dengan tingkat kebenaran 95 persen adalah 1,96. Hal ini telah memberikan bukti bahwa harga T hitung lebih besar jika dibandingkan harga T tabel ($9,814 > 1,96$) atau dalam kaidah statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Kedua hasil perhitungan ini telah memberikan bukti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara kemampuan dengan pelaksanaan program PDMDKE secara positif dan signifikan.

Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa kemampuan pelaksana program tidak dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan program PDMDKE. Proses peningkatan kemampuan pelaksana program harus menjadi perhatian utama sehingga program-program yang telah dirancang dapat dijalankan dengan sempurna sebagai akibat adanya kemampuan dari diri pelaksana program.

G.2. Hubungan Koordinasi Dengan Pelaksanaan Program

Hubungan antara variabel Koordinasi dengan pelaksanaan program menunjukkan bahwa responden yang menyatakan bahwa tingkat koordinasi program dirasa kurang baik maka terdapat 56,8% yang menyatakan bahwa pelaksanaan program PDMDKE dinilai juga kurang baik. Sedangkan mereka yang menilai bahwa koordinasi dianggap sangat baik maka 66,7% menyatakan bahwa pelaksanaan program dianggap baik. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa tingkat koordinasi berhubungan secara langsung terhadap tingkat pelaksanaan program. Meskipun demikian, hubungan antara kedua variabel ini perlu dicermati lebih jauh dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Hasil tabel silang antara kedua variabel tersebut dapat terlihat secara rinci pada Tabel 4.42 berikut ini :

Tabel. 4.42
Hubungan Antara Koordinasi Dengan Pelaksanaan Program

KOORDINASI	PELAKSANAAN PROGRAM				Total
	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat baik	
Kurang Baik	21 56,8%	16 43,2%			37 100,0%
Cukup	23 41,8%	29 52,7%	3 5,5%		55 100,0%
Baik	8 14,5%	36 65,5%	11 20,0%		55 100,0%
Sangat baik			4 66,7%	2 33,3%	6 100,0%
Total	52 34,0%	81 52,9%	18 11,4%	2 1,3%	153 100,0%

Hasil uji statistik hubungan antara koordinasi dengan pelaksanaan program dapat terlihat pada Tabel 4.43 berikut ini:

Tabel. 4.43
Uji Kendall Antara koordinasi Dengan Pelaksanaan Program

		Value	Asymp. Std. Error	Approx. T	Approx. Sig.
Ordinal	Kendall's tau-b	,438	,060	6,716	,000
N		153			

Tabel 4.43. diatas menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,438. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan uji T dimana koefisien T hitung sebesar 6,716 dan apabila dilihat T tabel dengan tingkat kebenaran 95 persen maka harga T tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa harga T hitung lebih besar jika dibandingkan harga tabel ($6,716 > 1,96$) atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima dan dapat dinyatakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara koordinasi dengan pelaksanaan program.

Oleh sebab itu, peningkatan upaya koordinasi terutama antar dinas/instansi merupakan faktor yang dapat dihindari. Upaya dalam mensepakati sasaran program perlu dikoordinasi dengan sempurna sehingga akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa semua instansi mempunyai kriteria yang sama.

G.3. Hubungan Pengawasan Dengan Pelaksanaan Program

Hubungan antara variabel pengawasan dengan pelaksanaan program menunjukkan bahwa responden yang masuk dalam kategori dengan tingkat pelaksanaan program kurang baik maka sebagian besar atau 45,9% mempunyai tingkat pengawasan yang kurang baik. Sedangkan mereka yang mempunyai tingkat pelaksanaan yang sangat baik maka sebagian besar atau 100,0 persen juga mempunyai tingkat pengawasan yang sangat baik. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa tingkat pengawasan berhubungan secara langsung terhadap tingkat pelaksanaan program. Meskipun demikian, hubungan antara kedua variabel ini perlu dicermati lebih jauh dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Hasil tabel silang antara kedua variabel tersebut dapat terlihat secara rinci pada tabel 4.44 berikut ini :

Tabel 4.44

Hubungan Antara Pengawasan Dengan Pelaksanaan Program

Pengawasan	Pelaksanaan Program				Total
	Kurang baik	Cukup	Baik	Sangat baik	
Kurang baik	45 45,9%	52 53,1%	1 1,0%		98 100,0%
Cukup	7 16,7%	25 59,5%	10 23,8%		42 100,0%
Baik		4 36,4%	7 63,6%		11 100,0%
Sangat baik				2 100,0%	2 100,0%
Total	52 34,0%	81 52,9%	18 11,8%	2 1,3%	153 100,0%

Hasil uji statistik hubungan antara pengawasan dengan pelaksanaan program tercermin dalam Tabel 4.45 berikut ini :

Tabel. 4.45
Uji Kendall Antara Kemampuan Dengan Efekt4itas

		Value	Asymp. Std. Error	Approx. T	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	,478	,059	6,678	,000
N of Valid Cases		153			

Tabel 4.45. diatas menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,478. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan uji T dengan koefisien T hitung sebesar 6,678 dan apabila dilihat T tabel dengan tingkat kebenaran 95 persen maka harga T tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa harga T hitung lebih besar jika dibandingkan harga T tabel ($6,678 > 1,96$) atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima dan dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pengawasan dengan variabel pelaksanaan program PDMDKE.

Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa varaibel pengawasan merupakan variabel penting dalam pelaksanaan program

PDMDKE. Dengan adanya pengawasan yang baik akan membantu dalam memonitor setiap langkah yang telah dilakukan oleh pelaksana program dan akan memperkecil tingkat penyimpangan program baik dalam pemilihan sasaran maupun dalam pengelolaan dana program.

G.4. Hubungan Kemampuan, Koordinasi dan Pengawasan Dengan

Pelaksanaan Program PDMDKE

Hubungan antara ketiga variabel independen yaitu kemampuan pelaksanaan program, koordinasi dan pengawasan diuji dengan menggunakan uji statistik Konkordansi Kendall's. Hasil perhitungan terhadap hubungan tersebut dapat tercermin pada Tabel.4.46 berikut ini :

Tabel. 4.46
Uji Konkordasi

	Mean Rank
PELAKSANAAN	2,22
KEMAMPUAN	3,26
KOORDINASI	2,88
PENGAWASAN	1,64
N	153
Kendall's W	,460
W ² (%)	21,1
Chi-Square	211,119
df	3
Asymp. Sig.	,000

Tabel 4.46 diatas menunjukkan bahwa Koefisien Konkordansi Kendall adalah sebesar 0,460. Guna menguji tingkat kebenarannya maka dapat dilihat dari nilai Chi-Square (X^2) dimana terdapat nilai

sebesar 211,119 dan apabila dilihat dengan harga Chi-Square tabel dengan tingkat kebenaran 95% (DF=3, N=153) maka nilai Chi-Square tabel adalah sebesar 7,82. Hasil ini telah memberikan bukti bahwa nilai X^2 hitung lebih besar jika dibanding dengan nilai X^2 tabel (211,119 > 7,92). Hasil ini telah dapat dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara variabel kemampuan, koordinasi dan pengawasan dengan pelaksanaan program. Makna dari hubungan ini telah memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan program PDMDKE maka faktor-faktor kemampuan, koordinasi dan pengawasan tidak dapat dipisah-pisah. Apabila ketiga variabel ini betul-betul diperhatikan maka pelaksanaan program PDMDKE akan berjalan dengan baik.

Sedangkan koefisien determinasi Konkordansi Kendall (W^2) yang mencerminkan seberapa besar keeratan hubungan antara ketiga variabel independen dengan dependen menunjukkan nilai sebesar 21,1%. Atau dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel independen ini mempunyai sumbangan sebesar 21,1%, sedangkan sisanya sebesar 79,9% adalah faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program yang disebabkan oleh variabel lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan bahwa kemampuan pelaksana program PDMDKE dirasa masih sangat rendah, hal ini tercermin dari beberapa indikator dimana pelaksana program mempunyai pendidikan formal yang tidak memadai, tidak mempunyai pengalaman kerja yang banyak, rendahnya tingkat kematangan personil serta rendahnya kemampuan administrasi.
2. Variabel koordinasi yang merupakan salah satu variabel independen yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan dalam melakukan koordinasi sehingga telah menyebabkan kekuranglancaran dalam proses komunikasi program. Meskipun demikian, semua responden menyepakati perlu adanya kesamaan gerak antar dinas terkait dalam pelaksanaan program PDMDKE.
3. Pada sisi pengawasan program maka terlihat bahwa sebagian besar menyatakan bahwa proses pengawasan dapat berjalan dengan baik, akan tetapi efektivitas pengawasan masih sangat lemah. Hal ini terjadi karena proses pengawasan hanya terbatas pada aspek administratif sehingga tidak dapat melihat secara jelas pelaksanaan program pada masyarakat.
4. Keberhasilan pelaksanaan program ternyata dinilai cukup beragam oleh masyarakat dimana sebagian besar menyatakan bahwa program yang dilaksanakan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, meskipun

demikian masih terdapat penyimpangan dalam pemilihan sasaran program serta lemahnya aturan dalam pelaksanaan program.

B. Saran

Guna pengembangan Program PDMDKE maka perlu dipertimbangkan :

1. Peningkatan kemampuan pelaksana terutama berkaitan dengan ketrampilan manajemen proyek serta kemampuan komunikasi.
2. Sosialisasi program perlu lebih ditingkatkan terutama melalui media elektronik yang selama ini dianggap cukup efektif dalam sosialisasi program.
3. Penetapan kriteria penerima program harus konsisten sehingga setiap program akan mengarah pada sasaran yang sama. Kesulitan penetapan program merupakan masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan program PDMDKE sehingga ada kesan bahwa pelaksanaan program selama ini kurang memperhatikan aspek koordinasi.
4. Pengawasan program perlu dilakukan secara kontinyu dan tidak hanya terbatas pada aspek administrasi akan tetapi juga menyangkut monitoring usaha kelompok.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Bailey, Kenneth B, 1989, *Methods of Social Research*, The free Press, Collier Macmillan, London. .
- Bassaib, Saad,A., 1995, **Evaluasi Kinerja Pembangunan**, Dalam Majalah Perencanaan Pembangunan, No.2./1995/ Bappenas, Jakarta.
- Chambers, Robert, 1984, *Rural Development: Putting The Last First*, Longman, New York.
- Dayan, Anto, 1996, **Pengantar Metode Statistik** , Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Diana Conyers, 1991, **Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga**, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta .
- Djajanegara, S., dan Arifin, H., **Program Intervensi dalam Komuniti Keluarga Miskin**, Jurnal Sosiologi Indonesia, No.2/ September/1997, ISI.
- Dunn, William, 1994, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice Hall, Simin & Shuster Company Engelwood Clifts, New York.
- Etzioni, Amitay., 1976, *Modernization Organization*, Prentice Hall of India, Private United, New Delhi.
- Faturochman dan Molo, M., 1995, **Kemiskinan dan Kependudukan di Pulau Jawa**, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Ferlie, E., 1997, *The New Public Management In Action*", Oxford University, Oxford.
- Freemont, K., and Rozenweig, 1970, *Organization and Management*, Mc Graw Hill Book Company Ltd, Tokyo.
- Jazairy, Idris, 1992, *The State of The World Rural Poverty*, New York University Press, USA.
- Jones, Charles O, 1994, **Pengantar Kebijakan Publik**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (Terjemahan).
- Kartasmita, G., 1996, **Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**, CIDES, Jakarta.

- Korten D.C, 1986, **Pembangunan Berdimensi Kerakayatan**, LP3ES, Jakarta.
- Mooney, James D., 1985, **Dasar-dasar Organisasi**, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1984, **Strategi Pembangunan Pedesaan**, Pusat Penelitian Kependudukan, UGM, Yogyakarta.
- Mukiyat, 1984, **Prinsip-prinsip Manajemen**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Randall B. R and Fanklin, G., 1986, ***Policy Implementation and Bureucracy***, Dorsey Press, Chicago, USA.
- Siagian P. Sondang, 1995, **Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapi**, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Steers, Richard M., 1980, **Efektivitas Organisasi, Kaidah dan Tingkah Laku**, Terjemahan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 1997, **Metode Penelitian Administrasi**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suharsini Arikunto, 1996, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafrudin, A., 1976, **Pengantar Koordinasi Pemerintahan Di Daerah**, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Terry, G. George, 1987, ***Dimension of Modernization Theory of Organization***, Prentice Hall, New York.
- Tjokroamidjojo, B., 1973, **Pengantar Administrasi Pembangunan**, LP3ES, Jakarta.
- Tjokroawinoto, Moelyarto, 1993, **Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Arah dan Strategi**, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Wahab, A., 1991, **Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Akasara Jakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, **Evaluasi Kebijakan Publik**, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.

NON-BUKU

Djajanegara, S., dan Arifin, H., **Program Intervensi dalam Komuniti Keluarga Miskin**, Jurnal Sosiologi Indonesia, No.2/ September/1997, ISI.

Folder Jaring Pengaman Sosial (JPS), Propinsi Jawa Tengah.

Tomagola, T., **Indikator Keluarga Sejahtera**, Jurnal Sosiologi Indonesia, No.2/ September/1997, ISI.

Materi Pendukung Pelaksanaan Program PDMDKE Tahun 1999/2000, Tim Koordinasi Pengelolaan Programm PDMDKE, Pusat, Jakarta.

Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.

World Bank, 2000, *Evaluating The Impact of Development Project on Poverty*, Washington DC.